



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 89 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LAMEURU
KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Penerapan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Lameuru Kabupaten Konawe Selatan,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 nomor 15);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
TENTANG RENCANA STRATEGIS PENERAPAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LAMEURU
KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Strategi adalah langkah yang diberikan program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
12. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk Upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
14. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah suatu sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
15. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya diangkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

19. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerja.

BAB II

RENSTRA PENERAPAN BLUD UPTD PUSKESMAS LAMEURU

Pasal 2

- (1) UPTD Puskesmas Lameuru menyusun Renstra dengan berpedoman pada RPJMD dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan tahun 2021-2026.
- (2) Renstra BLUD UPTD Puskesmas Lameuru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rencana pengembangan layanan;
 - b. strategi dan arah kebijakan;
 - c. rencana program dan kegiatan; dan
 - d. rencana keuangan.
- (3) Renstra disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Pelayanan Puskesmas;
 - c. Permasalahan dan Isu Strategis Puskesmas;
 - d. Visi, Misi, Tujuan, dan Arah Kebijakan;
 - e. Rencana Strategis;
 - f. Penutup.
- (4) Renstra BLUD UPTD Puskesmas Lameuru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan serta berpedoman pada RPJMD bersifat indikatif.

- (5) Renstra BLUD UPTD Puskesmas Lameuru dirumuskan ke dalam rencana kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 3

Renstra BLUD UPTD Puskesmas Lameuru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

PENERAPAN BLUD UPTD PUSKESMAS LAMEURU

Pasal 4

- (1) UPTD Puskesmas Lameuru yang akan menerapkan BLUD menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah.
- (5) Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA BLUD UPTD PUSKESMAS LAMEURU

Pasal 5

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra BLUD UPTD Puskesmas Lameuru, mencakup indikator kinerja UPTD Puskesmas Lameuru serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra BLUD UPTD Puskesmas Lameuru.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala UPTD Puskesmas melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra BLUD UPTD Puskesmas Lameuru.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja BLUD UPTD Puskesmas Lameuru, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra BLUD UPTD Puskesmas dan telah dilaksanakan melalui Renja UPTD Puskesmas Lameuru.

Pasal 6

- (1) Dalam hal evaluasi dan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala UPTD Puskesmas Lameuru melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas Lameuru melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Renstra BLUD UPTD Puskesmas menjadi pedoman bagi Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas Lameuru dalam penyusunan Renja.
- (2) Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan melakukan sinkronisasi antara Renja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 8

Rencana Strategis (Renstra) BLUD UPTD Puskesmas Lameuru tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 30 Oktober 2023
BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 30 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Ttd

ST.CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 88

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 98

TAHUN 2023

TENTANG : RENCANA STRATEGIS PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM

DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LAMEURU

KAB. KONAWE SELATAN



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS LAMEURU

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Lameuru periode 2021-2026, ini dapat diselesaikan.

UPTD Puskesmas Lameuru adalah salah satu Puskesmas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Status UPTD Puskesmas Lameuru adalah Puskesmas Rawat inap. Dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat selama ini banyak mengalami keterbatasan baik dari segi sarana dan prasarana yang kurang memenuhi standar, bangunan dan alat - alat kesehatan, keterbatasan tenaga baik medis maupun non medis dan juga sistem pengelolaan keuangan puskesmas non BLUD yang mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Seluruh pendapatan yang diperoleh Puskesmas harus disetor ke kas daerah, kemudian dialokasikan kembali ke Puskesmas sebagai bagian dari Rencana Kerja yang diusulkan oleh Satuan Unit Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang menjadi induknya. Alokasi anggaran yang diterima Puskesmas seringkali tidak sesuai dengan skala prioritas yang telah direncanakan oleh UPTD Puskesmas Lameuru. Fleksibilitas dan keluasaan dalam pengelolaan keuangan sangat dibutuhkan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itulah pemerintah merencanakan seluruh Puskesmas akan diubah statusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Kepala UPTD

Puskesmas Lameuru



DADANG SAPUTRA, SKM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian Rencana Strategi	1
C. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis	2
D. Dasar Hukum Rencana Strategis.....	2
E. Perubahan Rencana Strategis.....	3
F. Sistematika Penulisan	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PUSKESMAS	
A. GAMBARAN UMUM PUSKESMAS	5
1. Wilayah Kerja.....	5
2. Pelayanan Puskesmas.....	7
B. GAMBARAN ORGANISASI PUSKESMAS.....	9
1. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi.....	9
2. Sumber Daya Puskesmas.....	19
C. KINERJA PELAYANAN PUSKESMAS	23
1. Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat	23
2. Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Perorangan.....	31
3. Capaian Kinerja Administratif dan Manajemen	33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS	
A. IDENTIFIKASI MAALAH KESEHATAN MASYARAKAT	35
B. ISU TRATEGIS	40
C. RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN	42
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN	
A. VISI PUSKESMAS	47
B. MISI, MOTTO DAN TATA NILAI PUSKESMAS.....	47
C. TUJUAN PUSKESMAS	49
D. SASARAN PUSKESMAS	49
E. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	51
F. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN	58
BAB V PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Profil Ketenagaan di UPTD Puskesmas Lameuru tahun 2022	20
Tabel 2.2	Realisasi Keuangan Puskesmas Lameuru Tahun 2022	22
Tabel 2.3	Jumlah Pustu dan Posyandu Puskesmas Tahun 2022	22
Tabel 2.4	Sarana Prasarana di UPTD Puskesmas Lameuru Tahun 2022	23
Tabel 2.5	Hasil Identifikasi Masalah Upaya Promosi Kesehatan Berdasarkan Indikator PKP UPTD Puskesmas Lameuru Tahun 2022	24
Tabel 2.6	Hasil Identifikasi Masalah Upaya Capaian Upaya Kesehatan Lingkungan UPTD Puskesmas Lameuru Tahun 2022	25
Tabel 2.7	Hasil Identifikasi Masalah Upaya Capaian Kesehatan Ibu, Anak dan KB UPTD Puskesmas Lameuru Tahun 2022	26
Tabel 2.8	Hasil Identifikasi Masalah Upaya Capaian Perbaikan Gizi Masyarakat UPTD Puskesmas Lameuru Tahun 2022	27
Tabel 2.9	Cakupan Status Gizi Balita Indikator BB/TB hasil BPB UPTD Puskesmas Lameuru Tahun 2022	29
Tabel 2.10	Hasil Capaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di UPTD Puskesmas Lameuru Tahun 2022	30
Tabel 2.11	Kunjungan rawat jalan UPTD Puskesmas Lameuru Tahun 2020 – 2022	31
Tabel 4.1	Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan UPTD Puskesmas Lameuru Tahun 2021-2026	50
Tabel 5.1	Rencana pendapatan yang akan dicapai oleh UPTD Puskesmas Lameuru pada tahun 2021 - 2026	59

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Kunjungan Pasien Ruang Pelayanan Umum UPTD Puskesmas Lameuru Tahun 2020 – 2022	32
Grafik 2.2	Kunjungan pasien pelayanan MTBS UPTD Puskesmas Lameuru Tahun 2020 – 2022	32
Grafik 2.3	Kunjungan pasien pelayanan Gigi UPTD Puskesmas Lameuru Tahun 2020 – 2022	32
Grafik 2.4	Kunjungan pasien pelayanan Laboratorium UPTD Puskesmas Lameuru Tahun 2020 – 2022	33
Grafik 2.5	Kunjungan pasien pelayanan KIA/KB UPTD Puskesmas Lameuru Tahun 2020 – 2022	33
Grafik 2.6	Kunjungan pasien pelayanan UGD/Tindakan UPTD Puskesmas Lameuru Tahun 2020 – 2022	33
Grafik 2.7	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022	34

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis Dinas kesehatan yang menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional Dinas Kesehatan dan ujung tombak pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mempunyai fungsi sebagai penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama dan Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama.

Puskesmas dalam menjalankan fungsinya perlu memiliki arah dan rencana yang jelas sesuai dengan visi pembangunan kesehatan di daerah. Arah dan rencana tersebut dituangkan dalam indikator kinerja dan target yang akan dicapai dalam periode waktu tertentu.

Setiap tahun rencana tersebut akan dibuat target kinerja dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan serta jika perlu dilakukan juga perubahan rencana sesuai dengan perubahan situasi dan kebijakan.

Penyusunan rencana strategis Puskesmas dalam rangka penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dilaksanakan oleh tim perencanaan tingkat Puskesmas yang ditunjuk oleh kepala Puskesmas melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Puskesmas.

Sebagai unit pelaksana teknis, penyusunan rencana strategis Puskesmas mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan menyesuaikan dengan kondisi sumber daya, lingkungan (biologi, psikologi, sosial, budaya), kebutuhan masyarakat dan peran masyarakat di wilayah kerja Puskesmas.

B. PENGERTIAN RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD, rencana strategis pada BLUD adalah perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan

mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.

Rencana Strategis Puskesmas memuat antara lain:

- Rencana pengembangan layanan
- Strategi dan arah kebijakan
- Rencana program dan kegiatan
- Rencana keuangan

Rencana Strategis BLUD Puskesmas ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah, Rencana Strategis BLUD Puskesmas tersebut disusun dan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas untuk maju dalam tahap selanjutnya yaitu penilaian.

C. TUJUAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

Beberapa tujuan yang hendak dicapai atas penyusunan Rencana Strategis diantaranya adalah:

1. Sebagai *Road Map* dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya Puskesmas untuk pencapaian visi dan misi Organisasi.
2. Sebagai pedoman alat Pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran.
3. Untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh staf Puskesmas, meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

D. DASAR HUKUM RENCANA STRATEGIS

Dasar Hukum untuk menyusun Rencana Strategis Puskesmas adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
7. Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah.
8. Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.
9. Peraturan Kepala Daerah tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan.
10. Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Puskesmas Pembantu Menjadi Pusat Kesehatan Masyarakat.
11. Peraturan Kepala Dinas Kesehatan tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan.
12. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Dinas Kesehatan.
13. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Dinas Kesehatan.
14. Praktik-praktik terbaik (*best practices*) penerapan etika bisnis dalam dunia usaha.

E. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis puskesmas ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana strategis puskesmas sebagaimana disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan organisasi puskesmas serta perubahan lingkungan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan dokumen Rencana Strategis sebagai berikut:

Kata Pengantar

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PUSKESMAS

A. Gambaran Umum Puskesmas

B. Gambaran Organisasi Puskesmas

C. Kinerja Pelayanan Puskesmas

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PUSKESMAS

A. Identifikasi Masalah Kesehatan Masyarakat

B. Isu Strategis

C. Rencana Pengembangan Layanan

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Visi Puskesmas

B. Misi Puskesmas

C. Tujuan (Rencana Pengembangan Layanan)

D. Sasaran (Sasaran Pengembangan Layanan)

E. Strategi Dan Arah Kebijakan

F. Program, Kegiatan, Subkegiatan Dan
Kerangka Pendanaan

BAB V : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PUSKESMAS

A. GAMBARAN UMUM PUSKESMAS

1. Wilayah Kerja

Puskesmas Lameuru lokasinya berada di Desa Lameuru tepatnya di jalan Poros Ambaipua-Andepali Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan. Puskesmas Lameuru berjarak ± 75 Km dari sebelah timur Ibu kota Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo dan ± 40 Km dari Ibu Kota Provinsi di Kendari. Jalan yang ditempuh ke Puskesmas dapat dilalui oleh kendaraan roda empat dan roda 2 dan tidak ada kendala untuk menjangkau Puskesmas.

Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------|---|---|
| Sebelah Utara | : | Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Sampara di Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe |
| Sebelah Timur | : | Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Ranomeeto di Kecamatan Ranomeeto |
| Sebelah Barat | : | Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Landono di Kecamatan Landono |
| Sebelah Selatan | : | Wilayah kerja UPTD Puskesmas Ranomeeto di Kecamatan Ranomeeto |

Luas wilayah kerja Puskesmas Lameuru Kecamatan Ranomeeto Barat adalah $69,07 \text{ Km}^2$ dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 adalah 8.271 jiwa dengan jumlah rumah tangga 2.429 kepala keluarga, yang terdiri dari 9 Desa. Diantaranya adalah :

1. Desa Abeko terbagi atas 3 dusun
2. Desa Lameuru terbagi atas 3 dusun
3. Desa Opaasi terbagi atas 3 dusun
4. Desa Boro-boro Lameuru terbagi atas 3 dusun
5. Desa Tunduno terbagi atas 3 dusun
6. Desa Laikandonga terbagi atas 3 dusun
7. Desa Jati Bali terbagi atas 3 dusun

8. Desa Sindang Kasih terbagi atas 4 dusun

9. Desa Amokuni terbagi atas 3 dusun

Topografi wilayah kerja Puskesmas Lameuru sebagian besar merupakan dataran, bukan pesisir pantai yang terbentang dari Barat ke Timur dengan ketinggian tertinggi \pm 120 m di atas permukaan laut, yang memungkinkan disaat musim hujan ada beberapa desa yang menjadi daerah langganan banjir yaitu Desa Laikandonga dan Tunduno.

Wilayah kerja Puskesmas Lameuru secara umum beriklim tropis yang dipengaruhi oleh angin musim. Sebagai daerah tropis Puskesmas Lameuru memiliki musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim panca roba. Curah hujan yang paling rendah terjadi pada bulan Desember, sedangkan curah hujan yang paling tinggi terjadi pada bulan Agustus dengan curah hujan 585,2 mm, jumlah hari hujan 28 hari. Suhu berkisar antara 20,8^oC-35,4^oC, dengan kelembaban 75-98%. Berdasarkan karakteristik wilayah, Puskesmas Lameuru merupakan Puskesmas kawasan pedesaan, sedangkan berdasarkan kemampuan penyelenggaraan termasuk dalam kategori Puskesmas Rawat Inap.

UPTD Puskesmas Lameuru sesuai dengan Permenkes RI No. 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama diwilayah kerjanya.
2. Penyelenggara Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya

UPTD Puskesmas Lameuru berlokasi di Jalan Poros Ambaipua-Andepali Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan, kode pos 93372, dengan wilayah kerja sebanyak 9 desa kecamatan Ranomeeto Barat UPTD Puskesmas Lameuru didukung jejaring dibawahnya sebanyak 3 Puskesmas pembantu (Pustu), 10 Posyandu balita, 9 Posyandu lansia, 9 Posbindu PTM, 9 Posyandu Remaja ditambah jaringan praktik mandiri bidan dan lain-lain.

Posisi tersebut merupakan suatu kemudahan bagi Puskesmas Lameuru dalam hal melakukan upaya pelayanan

rujukan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang lebih tinggi. Puskesmas Lameuru yang berada di jalur jalan kabupaten dengan lokasi yang strategis memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan. Pada tahun 2017 UPTD Puskesmas Lameuru meraih sertifikat Akreditasi Puskesmas dengan strata Madya.

2. Pelayanan Puskesmas

Upaya kesehatan tingkat pertama yang menjadi tanggung jawab Puskesmas Lameuru meliputi :

- a. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Perkesmas
 - 1) Upaya Promosi Kesehatan
 - 2) Upaya Kesehatan Lingkungan
 - 3) Upaya Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana
 - 4) Upaya Gizi Masyarakat
 - 5) Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tuberkulosis
 - Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta
 - Imunisasi
 - Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue
 - Pencegahan dan Pengendalian HIV-AIDS
 - Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
 - Surveilens
 - Pencegahan dan Pengendalian ISPA/Diare
 - Kesehatan Jiwa
 - 6) Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)
- b. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan
 - 1) Pencegahan dan pengendalian Hepatitis
 - 2) Kesehatan Usia Lanjut
 - 3) Kesehatan gigi dan Mulut Masyarakat
 - 4) Usaha Kesehatan Sekolah
 - 5) Kesehatan Kerja dan Olahraga
 - 6) Kesehatan Indera
 - 7) Kesehatan Tradisional

Sedangkan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama yang menjadi tanggung jawab Puskesmas Lameuru meliputi :

a. Rawat Jalan

- 1) Pemeriksaan Umum
- 2) Pemeriksaan Gigi
- 3) Pemeriksaan Lansia
- 4) Pemeriksaan Anak/MTBS
- 5) Pemeriksaan Ibu dan Anak
- 6) Pelayanan Keluarga Berencana
- 7) Pelayanan Imunisasi
- 8) Konseling terpadu
- 9) Pemeriksaan Penyakit Tidak Menular (PTM)
- 10) Pelayanan pemeriksaan kesehatan jiwa
- 11) Pelayanan pemeriksaan deteksi dini kanker leher rahim
- 12) Pelayanan pemeriksaan infeksi menular seksual dan HIV
- 13) Pelayanan Obat/Farmasi
- 14) Pelayanan Laboratorium

b. Pelayanan Gawat Darurat

c. Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar (PONED)

Pelayanan Rawat Inap selain itu jika diperlukan, UPTD Puskesmas Lameuru juga melaksanakan pelayanan rujukan rawat jalan dan rujukan Gawat Darurat.

UKM dan UKP yang dilaksanakan oleh Puskesmas Lameuru telah dikembangkan melalui berbagai inovasi untuk menjangkau seluruh masyarakat di wilayah kerja. Beberapa Inovasi UKM yang telah dikembangkan antara lain :

- Gerakan cegah stunting Ranomeeto Barat (Gagah Ranbar)
- Gerakan Sapu bersih Lingkungan Masjid sambut Ramadhan (Saber Ramadhan)
- Pemberdayaan masyarakat desa melalui Juru Pemantau Jentik (Jumantik) dan pemberian abate untuk pencegahan Demam Berdarah
- Temukan Obati Sampai Sembuh (TOSS TB)
- Gerakan Pencegahan Karies Gigi Anak (Ceria)
- Gerakan Jumat senam bersama lansia

Sedangkan pada pelayanan kesehatan perseorangan, terdapat pelayanan kesehatan dasar rawat inap seperti pemeriksaan kesehatan umum dan pemeriksaan kesehatan gigi, serta beraneka ragam layanan yang ditawarkan kepada pelanggan. Beberapa inovasi UKP yang dilaksanakan antara lain:

- Ruang Informasi dan Pojok pengaduan

Puskesmas Lameuru juga melakukan pelayanan gawat darurat 24 jam dan Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar (PONED).

B. GAMBARAN ORGANISASI PUSKESMAS

1. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur organisasi UPTD Puskemas Lameuru Kabupaten Konawe Selatan terdiri dari:

- a. Kepala Puskesmas
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha yaitu tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma 3 yang memahami administrasi keuangan dan sistem informasi kesehatan yang bertanggung jawab membantu Kepala Puskesmas sebagai Koordinator tim Manajemen Puskesmas, dalam pengelolaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Pelaporan, serta Sistem Informasi Puskesmas yang terdiri dari:
 - 1) Pelaksana Keuangan
 - a) Pelaksana Bendahara Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
 - b) Pelaksana Bendahara Penerimaan Pembantu
 - c) Pelaksana Bendahara Pengeluaran Pembantu
 - d) Pelaksana Bendahara BOK
 - e) Pelaksana Bendahara non Kapitasi JKN FKTP
 - 2) Pelaksana Keuangan setelah menjadi BLUD
 - a) Pelaksana Bendahara Pengeluaran BLUD
 - b) Pelaksana Bendahara Penerimaan BLUD
 - c) Pelaksana Bendahara Pengeluaran Pembantu
 - 3) Pelaksana Umum dan Kepegawaian

- a) Pelaksana sarana Prasarana Lingkungan / Bangunan
 - b) Pelaksana Pengelolaan Barang
 - c) Pelaksana Sarana Prasarana Kendaraan
 - d) Pelaksana Administrasi dan Kepegawaian
- 4) Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan
- 5) Pelaksana Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (Simpus)
- c. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)
- 1) Penanggung jawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) yang membawahi:
 - a) Koordinator pelayanan promosi kesehatan
 - b) Koordinator pelayanan kesehatan lingkungan
 - c) Koordinator pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM
 - Pelaksana Deteksi Dini Tumbuh Kembang
 - Pelaksana Keluarga Berencana
 - Pelaksana Kesehatan Reproduksi
 - d) Koordinator pelayanan gizi yang bersifat UKM
 - e) Koordinator pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit
 - Pelaksana Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tuberkulosis
 - Pelaksana Pencegahan Penyakit Kusta
 - Pelaksana Imunsasi
 - Pelaksana PD3I
 - Pelaksana surveilans
 - Pelaksana Pencegahan dan Pengendalian Penyakit demam Berdarah Dengue (DBD)
 - Pelaksana Penyakit ISPA/DIARE
 - Pelaksana Pencegahan dan Pengendalian Kasus HIV-AIDS dan IMS
 - Pelaksana Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)
 - Pelaksana Kesehatan Jiwa

- Pelaksana pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang (P2BB).
- f) Koordinator pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
- 2) Penanggung jawab UKM Pengembangan, membawahi upaya pengembangan yang dilakukan Puskesmas, antara lain:
 - a) Koordinator pelayanan kesehatan gigi masyarakat
 - b) Koordinator pelayanan kesehatan tradisional komplementer
 - c) Koordinator pelayanan kesehatan olahraga
 - d) Koordinator pelayanan kesehatan kerja
 - e) Pelayanan kesehatan lainnya seperti:
 - Koordinator Usaha Kesehatan Sekolah
 - Koordinator Pelayanan Kesehatan Indera
 - Koordinator Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (Usila)
 - Koordinator Pencegahan Penyakit Hepatitis
- d. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), Kefarmasian dan Laboratorium, antara lain:
 - 1) Koordinator pelayanan pemeriksaan umum
 - 2) Koordinator pelayanan kesehatan gigi dan mulut
 - 3) Koordinator pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP
 - 4) Koordinator pelayanan gawat darurat
 - 5) Koordinator pelayanan gizi yang bersifat UKP
 - 6) Koordinator pelayanan persalinan
 - 7) Koordinator pelayanan kefarmasian
 - 8) Koordinator pelayanan laboratorium
- e. Penanggung Jawab Jaringan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas
 - 1) Puskesmas Pembantu
 - 2) Jejaring Puskesmas
- f. Penanggungjawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas
 - 1) Koordinator Keamanan
 - 2) Koordinator Peralatan

- 3) Koordinator Bencana/TGC
 - 4) Koordinator Kebakaran
- g. Penanggung jawab Mutu

Uraian tugas masing masing struktur yang terdapat dalam bagan organisasi seperti diuraikan diatas adalah sebagai berikut (dapat mengacu peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi Dinas Kesehatan):

- a) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas :
 1. Menyusun rencana dan program kerja UPTD Puskesmas;
 2. Melaksanakan tugas jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;
 3. Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi seluruh kegiatan UPTD Puskesmas;
 4. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Badan/Kantor terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 5. Memberikan pembinaan teknis kepada Jaringan dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ada di wilayah kerja puskesmas;
 6. Memberikan saran dan informasi kepada Kepala Dinas untuk bahan penetapan kebijakan lebih lanjut;
 7. Menyusun dan menyiapkan Anggaran UPTD;
 8. Melaksanakan kegiatan pencegahan, pengamatan dan pengendalian Penyakit;
 9. Melaksanakan kegiatan Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, Perbaikan Gizi dan Usaha Kesehatan, Usia Lanjut;
 10. Melaksanakan pengawasan kualitas air dan lingkungan, penyehatan lingkungan permukiman, penyehatan tempat-tempat umum dan penyehatan makanan/minuman;
 11. Melaksanakan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis usaha penyuluhan kesehatan

- masyarakat, sarana kesehatan dan metode serta penyebarluasan informasi kesehatan;
12. Melaksanakan kegiatan pengobatan rawat jalan, rawat inap termasuk palayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, usaha kesehatan mata, kesehatan jiwa, serta kesehatan olah raga, perawatan kesehatan masyarakat, pengelolaan obat-obatan dan alat laboratorium;
 13. Melaksanakan kegiatan rawat inap bagi Puskesmas yang memiliki tempat perawatan dan izin operasional;
 14. Memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
 15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- b) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana dan program kerja UPTD;
 2. Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja yang berkaitan dengan bidang administrasi dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan;
 3. Menyusun dan mempersiapkan naskah dinas, mengolah kearsipan dan dokumentasi;
 4. Menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan di lingkungan UPTD;
 5. Menyelenggarakan urusan rumah tangga UPTD;
 6. Menyusun, mempersiapkan dan mengkoordinasikan rencana anggaran satuan kerja UPTD;
 7. Melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan di lingkungan UPTD;
 8. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPTD;
 9. Melaksanakan inventarisasi barang-barang inventaris di lingkungan UPTD;

10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPTD dalam bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta bidang ketatausahaan lainnya;
 11. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala UPTD;
 12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang tugasnya
- c) Penanggung Jawab UKM Esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas)
1. Mengkoordinasikan kegiatan UKM Esensial UPTD Puskesmas
 2. Melakukan Monitoring atau pemantauan pelaksanaan kegiatan, kepatuhan prosedur, analisa kegiatan UKM.
 3. Melakukan evaluasi capaian kinerja dan mutu kegiatan UKM
 4. Melaporkan kepada Kepala UPTD Puskesmas
- d) Penanggung Jawab UKM Pengembangan
1. Mengkoordinasikan kegiatan UKM Esensial UPTD Puskesmas
 2. Melakukan Monitoring atau pemantauan pelaksanaan kegiatan, kepatuhan prosedur, analisa kegiatan UKM.
 3. Melakukan evaluasi capaian kinerja dan mutu kegiatan UKM
 4. Melaporkan kepada Kepala UPTD Puskesmas
- e) Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
1. Mengkoordinasikan kegiatan UKP UPTD Puskesmas
 2. Melakukan Monitoring atau pemantauan pelaksanaan kegiatan, kepatuhan prosedur, analisa kegiatan UKP.
 3. Melakukan evaluasi capaian kinerja dan mutu kegiatan UKP
 4. Melaporkan kepada Kepala UPTD Puskesmas.

f) Penanggung Jawab Jaringan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas

1. Mengkoordinasikan kegiatan UKM dan UKP di Jaringan Pelayanan Kesehatan
2. Melakukan Monitoring atau pemantauan pelaksanaan kegiatan, kepatuhan prosedur, analisa kegiatan UKM dan UKP di Jaringan Pelayanan Kesehatan.
3. Melakukan evaluasi capaian kinerja dan mutu kegiatan UKM dan UKP di Jaringan Pelayanan Kesehatan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan di Jejaring Pelayanan Kesehatan
5. Melaporkan kepada Kepala UPTD Puskesmas.

g) Penanggung jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas

1. Mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di Puskesmas Lameuru baik yang berasal dari APBD, maupun perolehan lain yang sah ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BBI) sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah.
2. Bersama tim Melakukan pemantauan dan monitoring pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala.
3. Melakukan monitoring dan update persediaan barang inventaris dan mencatatnya ke dalam kartu persediaan.
4. Membuat Laporan Barang pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (Lima) tahunan yang berada di Puskesmas Lameuru untuk diserahkan kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan.

h) Penanggung jawab Mutu

1. Menyusun rencana kerja upaya peningkatan mutu puskesmas
2. Menyiapkan instrument mutu puskesmas
3. Pelaksanaan self assesment maupun audit internal
4. Analisis hasil self assesment maupun audit internal
5. Pendokumentasian hasil self assesment maupun audit internal
6. Menyimpan dokumen mutu pelayanan puskesmas
7. Merevisi terhadap dokumen mutu puskesmas
8. Memberikan saran perbaikan kepada pelaksana mutu pelayanan dan dituangkan dalam revisi
9. Memberikan respon dari saran atau pengaduan pelanggan terhadap kepuasan pelanggan/klien
10. Mempublikasikan sasaran mutu tertentu dan hasil pencapaiannya setiap bulan pada papan informasi dalam gedung Puskesmas kepada pengunjung/pelanggan/klien.
11. Melaporkan pertanggungjawabannya kepada pimpinan manajemen mutu.

i) Pelaksanaan Perencanaan dan pelaporan

1. Menyiapkan bahan, dokumen, kebijakan, dan hasil kegiatan dalam penyusunan perencanaan kegiatan UPTD Puskesmas/Perencanaan Tingkat Puskesmas.
2. Menyusun pedoman kerja, prosedur kerja, dan kerangka acuan kegiatan perencanaan dan pelaporan.
3. Melakukan analisis bahan perencanaan kegiatan
4. Menyusun rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan Puskesmas
5. Menyusun evaluasi dan laporan hasil kegiatan
6. Melaporkan kepada kepala UPTD Puskesmas

j) Pelaksana Keuangan

1. Menyiapkan bahan, dokumen dan kebijakan perencanaan keuangan
2. Menyusun pedoman kerja, prosedur kerja, dan kerangka acuan kegiatan pengelolaan keuangan
3. Menyusun perencanaan kegiatan pengelolaan keuangan
4. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengadministrasian keuangan
5. Menyusun evaluasi, analisis dan laporan keuangan
6. Melaporkan kepada kepala UPTD Puskesmas

k) Pelaksana Umum Kepegawaian

1. Menyiapkan bahan, dokumen, dan kebijakan, perencanaan kepegawaian sarana prasarana dan administrasi umum
2. Menyusun pedoman kerja, prosedur kerja, dan kerangka acuan kegiatan kepegawaian, sarana prasarana dan administrasi umum
3. Menyusun perencanaan kegiatan pengelolaan kepegawain, sarana prasaran dan administrasi umum.
4. Melaksanakan kegiatan pelaksanaan kepegawaian, sarana prasarana dan administrasi umum.
5. Melakukan analisis kepegawaian, sarana prasarana dan administrasi umum.
6. Menyusun rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan kepegawaian, sarana prasarana dan administrasi umum.
7. Melakukan evaluasi dan laporan kepegawaian, sarana prasarana dan administrasi umum
8. Melaporkan kepada kepala UPTD Puskesmas.

l) Koordinator Program UKM

1. Menyiapkan bahan, dokumen dan kebijakan perencanaan kegiatan UKM

2. Menyusun pedoman kerja dan prosedur kerja UKM
 3. Menyusun perencanaan kegiatan UKM, Rencana Usulan kegiatan, Rencana Pelaksanaan kegiatan dan kerangka acuan kegiatan UKM
 4. Melakukan pencatatan dan pelaporan
 5. Melaksanakan evaluasi hasil kegiatan dan membuat rencana tindak lanjut
 6. Melaksanakan rencana tindak lanjut
- m) Koordinator Pelayanan UKP
1. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan diruang pelayanan
 2. Bertanggung jawab dalam penyiapan bahan, dokumen, dan kebijakan perencanaan kegiatan pelayanan.
 3. Bertanggung jawab dalam penyusunan pedoman dan prosedur kerja setiap jenis pelayanan.
 4. Menyusun rencana kebutuhan sarana kerja, alat kerja dan bahan kerja
 5. Melaksanakan pemenuhan indikator mutu, kinerja dan evaluasi hasil kegiatan pelayanan.
- n) Pelaksana Pelayanan UKP
1. Menyiapkan bahan dan alat kerja pelayanan
 2. Melaksanakan kegiatan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku
 3. Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan pelayanan
 4. Melaporkan hasil kegiatan kepada penanggung jawab pelayanan dan membuat rencana tindak lanjut.
- o) Penanggung Jawab Pustu, Polindes dan poskesdes
1. Bertanggung jawab dalam penyiapan bahan, dokumen, kebijakan perencanaan kegiatan pelayanan di Pustu
 2. Menyusun pedoman kerja dan prosedur kerja

3. Menyusun perencanaan kegiatan, rencana usulan kegiatan, Rencana Pelaksanaan kegiatan dan kerangka acuan kegiatan.
 4. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan
 5. Melaksanakan Kegiatan yang sudah direncanakan
 6. Melakukan evaluasi hasil kegiatan
 7. Melaporkan kepada kepala UPTD Puskesmas
- p) Pelaksana Pelayanan Puskesmas Pembantu
1. Menyiapkan bahan, dan alat kerja kegiatan
 2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan prosedur kerja yang berlaku
 3. Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan
 4. Melaporkan hasil kegiatan kepada penanggung jawab
 5. Membuat rencana tindak lanjut.

2. Sumber Daya Puskesmas

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di Puskesmas Lameuru meliputi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan. UPTD Puskesmas Lameuru sudah memenuhi tenaga bendahara, tenaga pengadministrasian umum, tenaga sistem informasi kesehatan, tenaga pengelola barang, tenaga pengelola program dan pelaporan, tenaga promkes, tetapi masih ada kekurangan jumlah perawat, apoteker, perekam medis, analis kesehatan, sopir ambulans, dan tenaga kasir. Berikut ini profil ketenagaan di UPTD Puskesmas Lameuru :

Tabel 2.1 Profil Ketenagaan di UPTD Puskesmas Lameuru
Tahun 2022

No	Jenis Tenaga	Jumlah	Status (ASN)	Standar Kebutuhan Minimal (Permenkes 43 tahun 2019)	Perhitungan Analisis Beban Kerja (permenkes 33 tahun 2015)	Kondisi Ideal yang dibutuhkan sesuai ABK
Tenaga Kesehatan						
1	Dokter dan/atau dokter layanan primer	1	ASN	1	1	0
2	Dokter gigi	2	ASN	1	2	0
3	Perawat	5	ASN	5	14	-9
4	Bidan	18	ASN	4	27	-9
5	Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	1	ASN	1	2	-1
6	Tenaga sanitasi lingkungan	1	ASN	1	3	-2
7	Nutrisionis	4	ASN	1	4	0
8	Tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian	3	ASN	1	5	-2
9	Ahli teknologi laboratorium medik	1	ASN	1	3	-2

10	Administrasi Kebijakan Kesehatan	5	ASN		5	0
11	Epidemiologi Kesehatan	6	ASN		7	-1
12	Perawat Gigi	1	ASN		2	-1
13	Perekam Medis	0	ASN		0	0
Tenaga Non Kesehatan						
1	Tenaga sistem informasi kesehatan	0	ASN	1	0	0
2	Tenaga administrasi keuangan	0	ASN	1	0	0
3	Tenaga ketatausahaan	0	ASN	1	0	0
4	Pekarya	0	ASN	2	0	0
5	Pengelola sistem Data Teknologi Informasi	2	ASN		2	0
6	Penata Layanan Kesehatan	3	ASN		3	0
7	Pengadministrasi Perkantoran	2	ASN		2	0
8	Asisten Pengelola obat dan makanan	0	ASN	0	0	0
9	Penata Layanan Operasional	0	ASN	0	0	0
Jumlah		55 ASN			82	-27

b. Sumber Daya Keuangan

Sumber Daya Keuangan Puskesmas Lameuru berasal dari Kapitasi JKN Puskesmas, Operasional APBD dan Bantuan Operasional Kesehatan. Dana Operasional yang didapatkan dari APBD masih tergolong kecil dan hanya mencukupi kebutuhan air dan listrik. Berikut Realisasi Keuangan Puskesmas Lameuru dari berbagai sumber dana :

Tabel 2.2 Realisasi Keuangan Puskesmas Lameuru
Tahun 2021-2022

NO	Sumber Dana	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	Operasional APBD	-	-
2	Bantuan Operasional kesehatan	Rp 627,553,125	Rp 718,613,000
3	Kapitasi JKN	Rp 284,705,800	Rp 276,376,700
4	Jampersal	Rp 15,695,000	-
5	Subsidi	-	-
6	Non Subsidi	-	-
	Jumlah	Rp 927,953,925	Rp 994,989,700

c. Sumber Daya Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana Puskesmas Lameuru cukup lengkap dengan kondisi gedung yang baru dibangun pada tahun 2022. Beberapa sarana masih perlu perhatian karena belum terpenuhinya sarana dan bangunan sesuai standar Permenkes (masih ada ruangan yang belum tersedia). Sarana dan prasarana Puskesmas tersebut tersebar juga dalam Puskesmas Pembantu, Posyandu, Polindes berikut ini:

Tabel 2.3. Jumlah Pustu dan Posyandu Di Puskesmas
Tahun 2021- 2022

NO	INDIKATOR	2021	2022
1.	Jumlah Puskesmas Pembantu	3	3
2.	Jumlah Posyandu	10	10
3.	Jumlah Posbindu	9	9
4.	Jumlah Posyandu Remaja	9	9
5.	Jumlah Posyandu Lansia	9	9

UPTD Puskesmas Lameuru memiliki mobil ambulan yang memadai meskipun memiliki pelayanan kamar bersalin, pelayanan tindakan 24 jam dan melayani rujukan kegawatdaruratan. Berikut adalah rincian dari sarana dan prasarana Puskesmas Lameuru

Tabel 2.4 Sarana Prasarana di UPTD Puskesmas Lameuru
Tahun 2022

No	Sarana	Jumlah/ Kecukupan	Kondisi		
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Gedung Puskesmas	1	1	-	-
2	Gedung Pustu	3	1	2	-
3	Gedung Poskesdes	10	10	-	-
4	Mobil Operasional	0	-	-	-
6	Ambulans	2	1	-	1
7	Mobil Jenazah	0	-	-	-
8	Motor Operasional	4	1	-	3
9	Alat kesehatan	201	199	-	2

C. KINERJA PELAYANAN PUSKESMAS

1. Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat

a) Upaya Promosi Kesehatan

Capaian kinerja upaya kesehatan masyarakat pada upaya promosi kesehatan selama tahun 2022 di Puskesmas Lameuru pada umumnya sudah memenuhi target. Namun demikian ada 6 (enam) indikator yang masih terdapat kesenjangan yaitu penyelenggaraan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) keluarga, pemberdayaan individu/kunjungan rumah, pembinaan PHBS RT, usaha kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) posyandu strata purnama dan mandiri, penggalangan kemitraan, dan penggunaan media KIE (penyebarluasan informasi). Berikut adalah rekapitulasi dari capaian kinerja upaya kesehatan masyarakat pada upaya promosi kesehatan pada Puskesmas Lameuru

Tabel 2.5 Hasil Identifikasi Masalah Upaya Promosi Kesehatan (Promkes) Berdasarkan Indikator PKP Puskesmas di Puskesmas Lameuru Tahun 2021-2022

No	Indikator Kinerja	2021			2022		
		Target	Pencapaian	Kesenjangan	Target	Pencapaian	Kesenjangan
1	Penyelenggaraan PHBS Keluarga	60%	65,3%	-	60%	47,7%	13%
	Penyelenggaraan PHBS di Sekolah	70%	65%	5%	70%	68,9%	1,1%
	Penyelenggaraan PHBS TTU	70%	76%	-	70%	38%	32%
2	Pembinaan PHBS RT	25%	13%	12%	25%	6,4%	18,6%
3	Strata Desa Siaga Aktif (Purnama dan Mandiri)	80%	11,7%	68,24%	80%	11,7%	68,24%

b) Upaya Kesehatan Lingkungan

Capaian kinerja upaya kesehatan masyarakat pada upaya promosi kesehatan lingkungan selama tahun 2022 di Puskesmas Lameuru pada umumnya belum memenuhi target, hanya kinerja cakupan pengawasan jamban saja yang dapat melebihi target kinerja. Berikut adalah rekapitulasi dari capaian kinerja upaya kesehatan masyarakat pada upaya promosi kesehatan lingkungan pada Puskesmas Lameuru.

Tabel 2.6 Hasil Capaian Upaya Kesehatan Lingkungan
di UPTD Puskesmas Lameuru Tahun 2021-2022

No	Indikator Kegiatan	2021			2022		
		Cakupan	Target	Kesenjangan	Cakupan	Target	Kesenjangan
1	Jumlah Desa yang melakukan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	100%	100%		100%	100%	
2	Presentasi penduduk terhadap akses air bersih yang memenuhi syarat	100%	100%	-	100%	100%	-
3	Presentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	70%	50%	-	80%	50%	-
4	Presentase tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	77%	100%	23%	80%	100%	20%

c) Upaya Kesehatan Ibu, Anak dan KB

Capaian kinerja upaya kesehatan masyarakat pada upaya kesehatan ibu, anak dan KB selama tahun 2022 di Puskesmas Lameuru pada umumnya sudah memenuhi target. Namun demikian ada 3 (tiga) indikator yang masih terdapat kesenjangan yaitu cakupan kunjungan neonatus lengkap pada sasaran kesehatan ibu, cakupan pelayanan anak balita pada sasaran kesehatan anak, dan cakupan peserta KB aktif pada sasaran keluarga berencana. Berikut adalah rekapitulasi dari capaian kinerja upaya kesehatan masyarakat pada upaya kesehatan ibu, anak dan KB pada Puskesmas Lameuru

Tabel 2.7 Hasil Capaian Upaya Kesehatan Ibu, Anak dan KB di UPTD Puskesmas Lameuru Tahun 2021-2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022		
			Target	Penca paian	Kesen jangan	Target	Penca paian	Kesen jangan
1	Kesehatan Ibu	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	95%	78%	17%	100%	72,73 %	27,27 %
		Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan	90%	98%	-	100%	82,54 %	17,46 %
		Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	100%	100%	-	100%	100%	-
		Cakupan Pelayanan Nifas	100%	98%	2%	100%	82,54 %	17,46 %
2	Kesehatan Anak	Cakupan Kunjungan Neonatus 1 (KN1)	100%	98%	2%	100%	82,54 %	17,46 %

		Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap (KN Lengkap)	100%	89%	11%	100%	82,54 %	17,46 %
		Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	80%	80%	-	80%	80%	-
		Cakupan Kunjungan Bayi	90%	89%	1%	100%	59,44 %	40,56 %
		Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%	50%	40%	90%	73,44 %	16,56 %
3	Keluarga Berencana	Cakupan Peserta KB Aktif	70%	28%	42%	70%	36,69 %	33,31 %

d) Upaya Gizi Masyarakat

Capaian kinerja upaya kesehatan masyarakat pada upaya gizi masyarakat selama tahun 2022 di Puskesmas Lameuru pada umumnya sudah memenuhi target. Namun demikian ada 3 (Tiga) indikator yang masih terdapat kesenjangan yaitu cakupan Balita ditimbang berat badannya (D/S), cakupan balita yang naik berat badannya, dan cakupan balita yang mempunyai buku KIA. Berikut adalah rekapitulasi dari capaian kinerja upaya perbaikan gizi masyarakat pada Puskesmas Lameuru

Tabel 2.8 Hasil Capaian Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat di UPTD Puskesmas Lameuru Tahun 2021-2022

No	Indikator Kegiatan	2021			2022		
		Cakupan	Target	Kesenjangan	Cakupan	Target	Kesenjangan
1	Cakupan Balita Ditimbang (D/S): Balita yang ditimbang Berat Badannya	67%	70%	3%	77,46	75	-
2	Cakupan Bayi Baru Lahir Mendapat IMD	75%	58%	-	79,49	62	-
3	Balita 6 – 59 bulan dapat Kapsul Vitamin A	87%	87%	-	94,37	88	-
4	Bayi 0 – 6 Bulan mendapatkan ASI Eksklusif	54%	45%	-	58,99	50	-
5	Cakupan Balita yang Naik Berat Badannya	84%	82%	-	77,46	75	-
6	Cakupan Balita yang mempunyai buku KIA	87%	70%	-	91,53	75	-
7	Cakupan Rematri di sekolah yang mendapatkan TTD	100%	52%	-	100	54	-
8	Cakupan Ibu Hamil KEK	100%	80%	-	100	80	-

	yang mendapatkan PMT						
9	Cakupan Distribusi Tablet Fe 90 tablet pada ibu hamil	100%	81%	-	100	82	-
10	Cakupan Balita Kurus yang mendapatkan PMT	100%	85%	-	42,86	85	42,14 %

Berdasarkan data tahun 2022 status gizi (BB/U) dengan jumlah balita yang ditimbang yaitu 622 orang, status gizi buruk dengan jumlah 1 orang dan gizi kurang sebanyak 75 orang sehingga status gizi baik di tahun 2022 sebanyak 546 orang. Indeks BB/U merupakan cara pengukuran status gizi yang menggambarkan status gizi saat ini (*Current Nutritional Status*) yang sangat dipengaruhi oleh umur dan karakteristik BB yang labil akibat penyakit atau peningkatan status gizi.

Tabel 2.9 Cakupan Status Gizi Balita Indikator BB/TB hasil BPB di UPTD Puskesmas Lameuru Tahun 2019-2022

Tahun	Sangat Kurus		Kurus		Normal		Gemuk	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
2019	0	0	3	0,84	620	99,35	1	0,16
2020	0	0	7	1,03	670	98,82	1	0,14
2021	0	0	0	0	524	100	0	0
2022	0	0	7	1,13	615	98,87	0	0

Status gizi balita berdasarkan indeks BB/TB, status gizi sangat kurus tahun tidak pernah ditemukan sejak tahun 2019 hingga tahun 2022. Status gizi kurus tahun 2022 meningkat sebesar 7 balita (1,13%) bila di bandingkan tahun 2021. Tahun 2021 didapatkan seluruh balita dalam status gizi normal 100%, sedangkan pada tahun 2022 sekalipun persentase mengalami penurunan dari tahun 2022 yaitu 98,87%, namun mengalami penambahan jumlah balita bergizi normal menjadi 615 balita. Status gizi gemuk tahun dah tidak ditemukan lagi sejak tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi makanan di masyarakat.

e) Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Capaian kinerja upaya kesehatan masyarakat pada upaya pencegahan dan pengendalian penyakit selama tahun 2022 di Puskesmas Lameuru pada umumnya sudah memenuhi target. Namun demikian ada 4 (empat) indikator yang masih terdapat kesenjangan yaitu cakupan system kewaspadaan dini, cakupan penderita pneumonia bayi, cakupan kesembuhan pasien TB BTA positif, dan penemuan penderita pnemonia. Berikut adalah rekapitulasi dari capaian kinerja upaya kesehatan masyarakat pada upaya pencegahan dan pengendalian penyakit pada Puskesmas Lameuru.

Tabel 2.10 Hasil Capaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di UPTD Puskesmas Lameuru Tahun 2021-2022

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	2021			2022		
			Target	Penca paian	Kesen jangan	Target	Penca paian	Kesen jangan
1	Pelayanan Imunisasi Dasar	Cakupan BCG	170	171	-	150	161	-
		Cakupan DPTHB 1	170	171	-	150	161	-
		Cakupan DPTHB 3	170	123		150	149	1
		Cakupan Polio 4	170	123		150	149	1
		Cakupan Campak	170	161		150	130	20
		Cakupan BIAS DT	380	380		171	171	-
		Cakupan BIAS TT	194	194		140	140	-
		Cakupan BIAS	194	194		171	1	-

		Campak						
		Cakupan Pelayanan Imunisasi Ibu Hamil TT2+	110	202		198	-	17
		Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization(UCI)	170	161		9 desa 100%	5 desa 100%	8 desa
2	Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit	Cakupan Penderita Pneumonia Balita	29%	52,5 %	-	32%	37,5%	-
		Cakupan angka Penemuan kasus baru semua kategori	29%	52,5 %	-	32%	12%	20
		Cakupan Kesembuhan Pasien TB BTA Positif	100%	26%	74%	100%	70%	30
		Cakupan Penderita DBD yang ditangani	4,81%	0,53 %	4,28%	4,81%	0,76%	4,05
		Cakupan Penemuan penderita Diare	100%	100%	-	100%	194%	-

2. Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Perorangan

Penduduk di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Lameuru di Kecamatan Ranomeeto Barat cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Selain karena adanya perkembangan perumahan/pemukiman baru juga karena banyak pendatang dari luar kecamatan hingga luar kabupaten/kota. Hal tersebut memiliki pengaruh terhadap peningkatan jumlah kunjungan pasien di UPTD Puskesmas Lameuru dan Jaringannya.

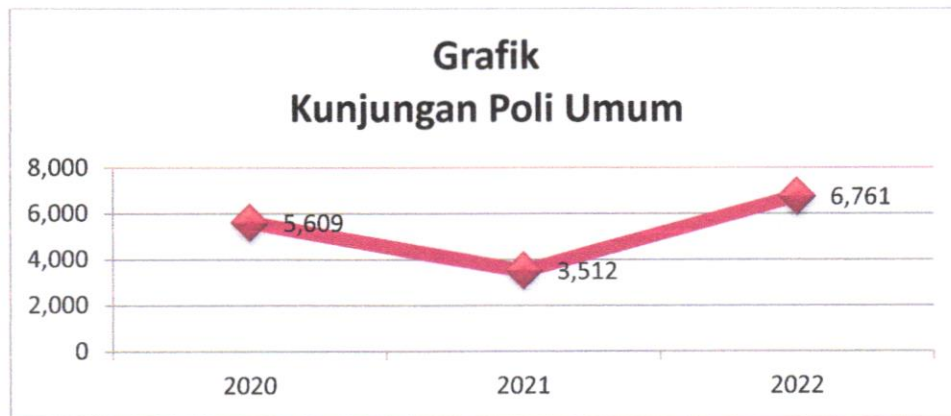
Tingkat kunjungan rawat jalan di UPTD Puskesmas Lameuru terdiri dari kunjungan puskesmas Induk (Puskesmas Lameuru) dan Pustu. Berikut gambaran kunjungan rawat jalan di puskesmas Lameuru:

Tabel 2.11 Gambaran Kunjungan Rawat jalan di UPTD Puskesmas Lameuru tahun 2020 s/d 2022

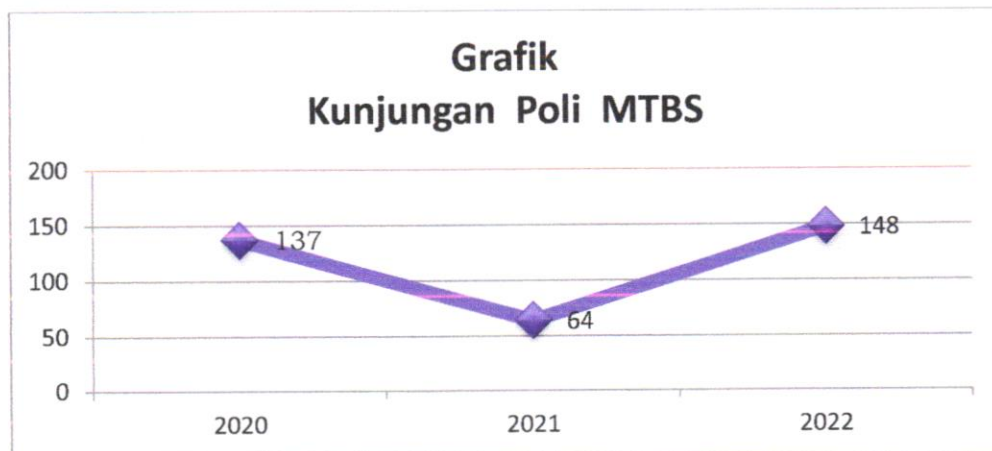
No	Unit Pelayanan	JUMLAH		
		2020	2021	2022
1	Puskesmas Lameuru	5.801	3.837	6.885
2	Pustu Amokuni	135	83	72
3	Pustu Sindangkasih	149	136	87
4	Pustu Laikandonga	0	0	0
Jumlah		6.085	4.056	7.044

Kunjungan Tiap Unit Layanan digambarkan pada grafik berikut ini:

Grafik 2.1 Kunjungan Pasien Ruang Pelayanan Umum UPTD Puskesmas Lameuru Tahun 2020 – 2022



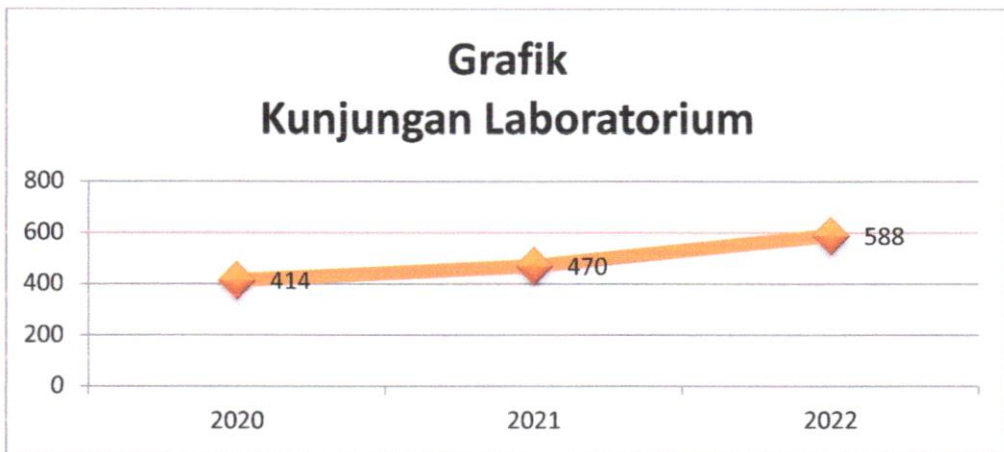
Grafik 2.2 Kunjungan Pasien Ruang Pelayanan MTBS UPTD Puskesmas Lameuru Tahun 2020 – 2022



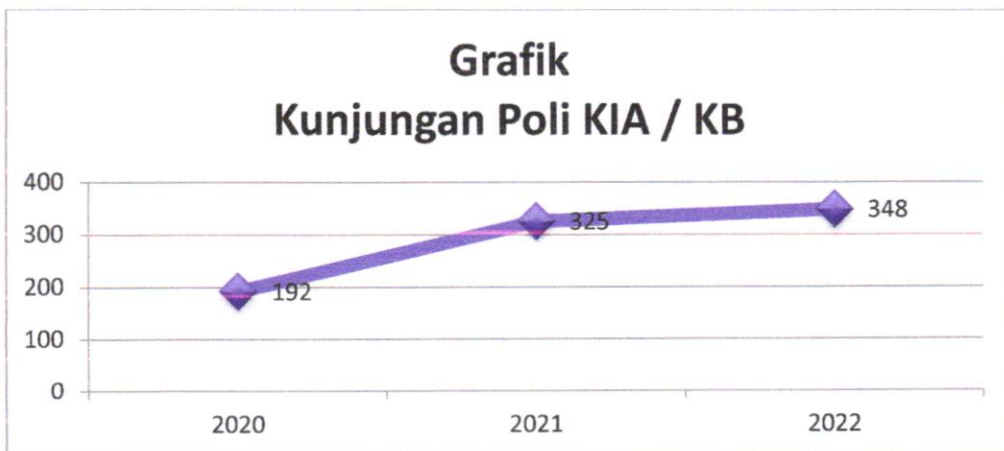
Grafik 2.3 Kunjungan Pasien Ruang Pelayanan Gigi
UPTD Puskesmas Lameuru Tahun 2020 – 2022



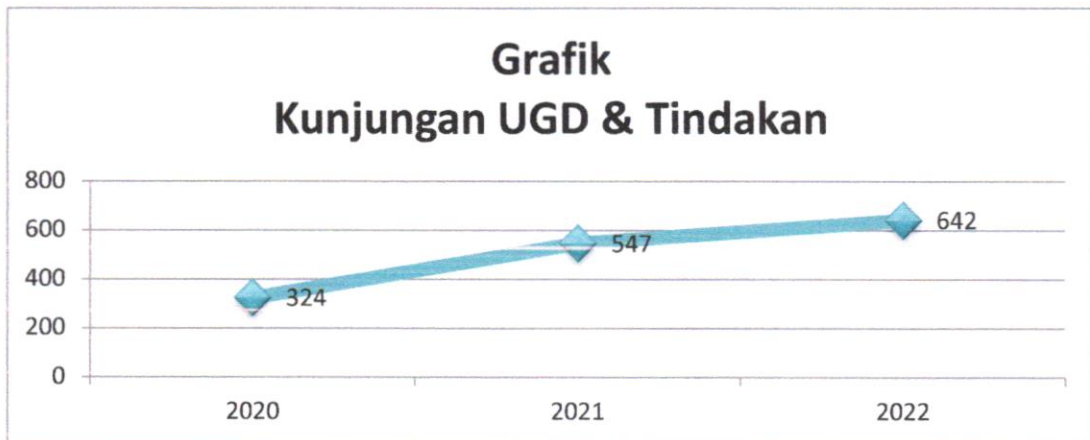
Grafik 2.4 Kunjungan Pasien Ruang Pelayanan Laboratorium
UPTD Puskesmas Lameuru Tahun 2020 – 2022



Grafik 2.5 Kunjungan Pasien Ruang Pelayanan KIA/KB
UPTD Puskesmas Lameuru Tahun 2020 – 2022



Grafik 2.6 Kunjungan Pasien UGD & Tindakan UPTD Puskesmas Lameuru Tahun 2020 – 2022



3. Capaian Kinerja Administrasi dan Manajemen

UPTD Puskesmas Lameuru melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas. Rata-rata tingkat kepuasan masyarakat di Puskesmas cukup tinggi dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai lebih dari 80%.

Grafik 2.7 Grafik Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022



BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

A. IDENTIFIKASI MASALAH KESEHATAN MASYARAKAT

Wilayah kerja UPTD Puskesmas Lameuru sebagian besar merupakan dataran rendah yang terbentang dari Barat ke Timur dengan ketinggian \pm 400 M. Diatas permukaan laut, yang memungkinkan disaat musin hujan ada beberapa desa yang menjadi daerah langganan banjir yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan Lingkungan. Penanganan sampah masih rendah juga ditemukan di beberapa Desa. Namun demikian terdapat juga peluang yang besar untuk penyelesaiannya.

Berapa masalah kesehatan masyarakat berkaitan dengan kinerja UPTD Puskesmas Lameuru pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana

Capaian beberapa kegiatan Kesehatan Ibu, Anak dan KB pasca salin masih mengalami beberapa masalah yaitu:

- Kegiatan program KIA belum mencapai target : K1, K4, Kunjungan Neonatus, dan Persalinan ditolong Tenkes
- Masih ada persalinan di tolong dukun
- Masih ada kematian neonatal yang disebabkan oleh kematian mendadak

FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
1. Menggunakan sasaran proyeksi	1. Terdapat kunjungan rumah pada ibu hamil
2. Kurangnya kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan diri	2. Terjalin kerjasama dengan KUA untuk pemberian penyuluhan dan bimbingan pra-nikah tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan sejak dini
3. Belum adanya pemetaan rumah bumil K1	3. Kemudahan mengakses sarana pelayanan kesehatan dengan dukungan infrastruktur dan
4. Luas wilayah dan jumlah penduduk yang tinggi	
5. Banyak penduduk pendatang/urban dengan	

<p>mobilisasi tinggi</p> <p>6. Penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan</p> <p>7. Kurangnya dukungan Keluarga dalam Pengambilan Keputusan untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang sesuai standar.</p> <p>8. Pemanfaatan buku KIA kurang maksimal</p> <p>9. Tidak adanya ambulans desa</p> <p>10. Terdapat dukun yang tinggal di perbatasan wilayah pelayanan Puskesmas Lameuru</p>	<p>sarana transportasi</p> <p>4. Adanya PONEID 24 jam</p> <p>5. Adanya jaminan Persalinan dan Jaminan Kesehatan Daerah walaupun dalam jumlah terbatas.</p> <p>6. Terdapat audit maternal – perinatal</p> <p>7. Adanya penyuluhan tentang pentingnya melakukan persalinan di fasilitas kesehatan</p>
---	---

Status Gizi

Capaian beberapa kegiatan gizi masih mengalami beberapa masalah yaitu:

- Presentase ibu hamil anemia tidak memenuhi target
- Persentase ibu hamil Kurang Energi Kroni (KEK) tidak memenuhi target
- Cakupan ibu hamil yang mendapat TTD 90 selama kehamilan tidak memenuhi target
- Cakupan Ibu hamil KEK yang mendapatkan makanan tambahan tidak memenuhi target
- Cakupan balita 6-59 bulan mendapat vitamin A
- Cakupan balita gizi kurang yang mendapat makanan tambahan

FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
1. Pengetahuan ibu hamil, orangtua, remaja, dan masyarakat tentang gizi	1. Adanya Distribusi PMT dan Tablet tambah darah 2. Adanya Dukungan Lintas

<p>masih kurang</p> <p>2. Ketersediaan tablet Fe, vitamin A, PMT local, bahan PMT Bumil tidak memadai</p> <p>3. Belum adanya pelatihan khusus penanganan balita kurus/ gizi kurang</p>	<p>Sektor</p> <p>3. Pelaksanaan Skrining Ibu Hamil yang dilaksanakan berkesinambungan.</p>
--	--

Imunisasi

Capaian beberapa kegiatan imunisasi masih mengalami beberapa masalah yaitu:

- Imunisasi Dasar Lengkap (IDL/ UCI Desa) belum memenuhi target
- Booster DPT-Hb-HiB belum memenuhi target
- Booster Campak belum memenuhi target

FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
<p>1. Kurangnya kerjasama lintas sector</p> <p>2. Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya imunisasi di masyarakat</p> <p>3. Tingginya penyakit infeksi pada bayi dan baduta sehingga pemberian imunisasi tidak tepat waktu yang berdampak pada kemunduran waktu pemberian imunisasi</p> <p>4. Adanya penolakan dari Sekolah Khusus (MIS Arrahman) pada pelaksanaan BIAS di sekolah</p>	<p>1. Adanya sosialisasi baik dari Dinas kesehatan provinsi, kabupaten dan puskesmas terutama bila terdapat Vaksin jenis baru</p> <p>2. Adanya pelatihan tatap muka</p>

Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan

Beberapa masalah penyakit menular dan kesehatan lingkungan yang masih menjadi masalah di wilayah kerja upgd Puskesmas Lameuru adalah:

- Tingginya Penemuan kasus baru TBC
- Adanya Kasus HIV dan Hepatitis
- Tingginya kasus DBD
- Masih rendahnya capaian *Annual Blood Examination Rate* (ABER)

FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
1. Terbatasnya pengadaan Alat pemeriksaan (Test Rapid Shypilis & Rapid Malaria)	1. Tersedianya jalur komunikasi dalam melakukan konsultasi dan koordinasi dengan P2 dinas kesehatan kabupaten untuk ketersediaan Test Rapid Shyphilis
2. Masih ada ibu hamil yang takut untuk di lakukan screening	2. Adanya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin
3. Tingginya stigma dimasyarakat tentang HIV	3. Pemenuhan kebutuhan bahan medis (RDT) yang memadai
4. Populasi berisiko yang tersembunyi dan belum terjangkau	
5. Lingkungan dan paparan pencemaran dengan adanya Daerah Aliran sungai hampir di seluruh Desa	
6. Rendahnya minat masyarakat untuk melakukan test secara dini	

Penyakit Tidak Menular

Masalah penyakit tidak menular di wilayah kerja UPTD Puskesmas Lameuru diantaranya:

- Tingginya kasus Hipertensi dan Diabetes Melitus
- Masih Rendahnya Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (15-59 tahun), 27% dari target 100%
- Masih rendahnya cakupan pemeriksaan skrining kanker leher Rahim
- Screening kesehatan jiwa belum memenuhi target

FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran <i>skrining</i> kesehatan yang masih rendah 2. Masyarakat masih berpola pemikiran paradigma sakit 3. Kesadaran gaya hidup sehat masih rendah 4. Keterbatasan petugas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kesejahteraan penduduk 2. Kemudahan akses fasyankes 3. Adanya peran serta masyarakat dan lintas sektor 4. Adanya dukungan dari Kepala Puskesmas pada saat desk kegiatan yang akan dilakukan di lapangan setiap tahunnya

Kualitas Pelayanan dan Upaya Kesehatan Perorangan

UPTD Puskesmas Lameuru dilengkapi dengan 3 (tiga) Poskesdes, selain itu terdapat juga beberapa Puskesmas yang berbatasan wilayah atau dekat dengan wilayah kerja Puskesmas Lameuru seperti: Puskesmas Ranomeeto, Puskesmas Landono, dan Puskesmas Sampara.

Hal-hal tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat persaingan pelayanan kesehatan sangat tinggi. Hal tersebut menjadikan Puskesmas Lameuru bertekad untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan menangkap peluang potensi pengembangan layanan dan peningkatan kapasitas pelayanan dengan mempelajari perilaku pencarian pengobatan (*health seeking behaviour*) masyarakat.

Masalah kualitas pelayanan kesehatan pada UKP di Puskesmas sebagai berikut:

- Ketersediaan obat, alkes dan BMHP masih belum mencukupi
- Angka Kontak Komunikasi yang masih rendah
- Tingginya Angka Ratio Rujukan Non spesifik

FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat persaingan yang tinggi 2. Jumlah peserta JKN Puskesmas yang masih rendah dibanding jumlah penduduk 3. Keterbatasan jumlah tenaga perawat (D3 dan Ners) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kesejahteraan masyarakat 2. Kemudahan akses terhadap fasyankes

4. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang Prosedur dan kriteria Rujukan	
5. Kurangnya Sarana Alat kesehatan dan Pemeriksaan Penunjang	

B. ISU STRATEGIS

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi UPTD Puskesmas Lameuru terdapat beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian karena dapat secara signifikan menimbulkan kerugian pada pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Beberapa permasalahan itu menjadi isu-isu yang harus dicari strategi penyelesaiannya. Permasalahan-permasalahan yang menjadi isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Lansia dan Gizi Masyarakat
2. Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Perbaikan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular serta Kesehatan Lingkungan
4. Perbaikan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Melalui Penerapan Standar Akreditasi Puskesmas dan Perkembangan Teknologi Informasi
 - a) Budaya Organisasi (tata nilai)

Rangkaian manajemen perubahan yang dilakukan oleh UPTD Puskesmas Lameuru telah membentuk suatu budaya organisasi baru. Sinergisme kegiatan yang dipadukan dengan implementasi BLUD akan meningkatkan kualitas pelayanan melalui budaya menjunjung tinggi etika dan hukum kesehatan, menjunjung tinggi kejujuran serta meningkatkan kepuasan pelanggan, profesionalisme, kompetensi dan kerjasama.

UPTD Puskesmas Lameuru memiliki Tata Nilai

- Handal, dalam mengoptimalkan potensi SDM yang ada di kecamatan Ranomeeto Barat
- Amanah, dalam melaksanakan pelayanan memiliki integritas yang dapat dipercaya
- Tulus, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- Iklas, dalam berkerja untuk mendapatkan hasil yang terbaik

b) Sumber Daya Keuangan

Persiapan penerapan BLUD di UPTD Puskesmas Lameuru dilaksanakan melalui: persiapan SDM, persiapan pengelolaan keuangan, persiapan pengelolaan sistem akuntansi keuangan BLUD, persiapan data dan dokumen pendukung serta persiapan sarana dan prasarana.

c) Sumber Daya Manusia

Secara umum terjadi perubahan pola pikir sumber daya manusia di UPTD Puskesmas Lameuru yang disebabkan oleh peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia secara umum baik melalui pendidikan formal maupun non formal berupa pelatihan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Konawe Selatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan.

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dilakukan melalui proses perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta perencanaan anggaran pendidikan dan pelatihan.

d) Sumber Daya Informasi

Implementasi Sistem Informasi (SIP) di Puskesmas sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 dan digantikan dengan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) pada tahun 2019 untuk seluruh Kabupaten/Kota Konawe selatan Sedangkan pelayanan pasien JKN sudah menggunakan aplikasi *P-Care* dari BPJS Kesehatan.

Dukungan perangkat *hardware*, *software* dan jaringan di UPTD Puskesmas Lameuru sudah terpenuhi melalui aplikasi SIPD.

Selain Sistem Informasi yang dikembangkan sendiri oleh Puskesmas, sistem pelaporan berbasis teknologi informasi sudah dilaksanakan oleh beberapa program seperti TB, Gizi, PTM, HIV, Malaria, Kesehatan kerja dan olahraga, ISPA, Imunisasi, KIA, Silantor dan Kepegawaian.

e) Sumber Daya Teknologi

Pemenuhan peralatan di UPTD Puskesmas Lameuru masih terbatas tetapi untuk pemeriksaan dasar pelayanan cukup tersedia seperti, unit diagnostik *vital sign* untuk pemeriksaan fisik pasien, unit nebulizer untuk tindakan gawat darurat serta *autoclave* untuk proses sterilisasi peralatan medis.

Selain peralatan pemeriksaan dasar, UPTD Puskesmas Lameuru telah memiliki perangkat penunjang berbasis teknologi seperti perangkat komunikasi internal serta pendaftaran online untuk pasien BPJS.

Pengadaan peralatan pemeriksaan dan perangkat berbasis teknologi tersebut berasal dari anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Konawe Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara serta anggaran kapitasi JKN Puskesmas.

f) Sumber Daya Fasilitas Fisik (Bangunan dan Peralatan)

Sarana bangunan Puskesmas merupakan bangunan baru tahun 2023, meskipun demikian, masih ada sarana bangunan yang belum terpenuhi yaitu penambahan ruang rawat inap, pembangunan rumah dinas dokter dan paramedic, serta pagar dan *paving block* halaman puskesmas.

Seluruh anggaran pengadaan dan pemeliharaan sarana berasal dari anggaran Dinas Kesehatan dan Kapitasi JKN Puskesmas.

C. RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN

Isu strategis berdasarkan analisis internal dan eksternal di UPTD Puskesmas Lameuru adalah sebagai berikut :

1. *Related Diversification* (keanekaragaman)

Diversifikasi pada UPTD Puskesmas Lameuru dapat dilihat dari berbagai macam jenis layanan yang sudah dikembangkan. Setiap layanan didukung oleh tenaga kesehatan profesional dan kompeten di bidangnya seperti dokter, dokter gigi, perawat, perawat gigi, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi, tenaga kefarmasian (apoteker, asisten apoteker), analis kesehatan, dan. Dengan demikian ada 11 (sebelas) jenis tenaga kesehatan yang dapat memberikan diversifikasi layanan kesehatan rawat jalan, UGD dan Kamar bersalin 24 jam.

Keanekaragaman layanan pada jam kerja pagi hari tergolong lengkap mulai pelayanan loket, pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi, pemeriksaan penyakit menular, pemeriksaan anak/MTBS, pemeriksaan ibu dan anak, pemeriksaan penyakit menular seksual, konsultasi terpadu, pemeriksaan laboratorium dan pelayanan farmasi. Sedangkan keanekaragaman layanan 24 jam yang ditunjang oleh tenaga perawat dan bidan profesional menyediakan unit gawat darurat, rujukan dan persalinan.

Semua keanekaragaman layanan di atas dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yaitu masyarakat akan layanan kesehatan yang lengkap.

2. *Market Development* (pengembangan pasar)

Pengembangan pasar yang dilakukan oleh UPTD Puskesmas Lameuru adalah dengan menjangkau konsumen atau masyarakat melalui pendekatan akses layanan kesehatan misalnya peningkatan ragam layanan di Puskesmas Pembantu, layanan Posyandu lansia, Posbindu di instansi dan sebagainya.

Selain itu dengan karakteristik masyarakat perdesaan yang banyak didominasi petani dan buruh maka Puskesmas Lameuru membuka layanan gawat darurat 24 jam di hari kerja meskipun belum lengkap seperti pelayanan pagi hari.

Akses terhadap Puskesmas yang mudah karena berada di lokasi strategis, jalan raya yang dilewati sarana transportasi umum, dekat dengan pemukiman dan dekat dengan sarana

tempat-tempat umum lainnya merupakan alasan tersendiri bagi konsumen untuk memilih Puskesmas Lameuru sebagai tempat mendapatkan layanan kesehatan.

Keterjangkauan biaya pelayanan di Puskesmas menjadikan Puskesmas Lameuru memiliki rentang karakteristik konsumen dengan tingkat ekonomi kurang, menengah hingga tingkat ekonomi atas. Kelengkapan fasilitas, kenyamanan ruang pelayanan, profesionalitas petugas, kejelasan prosedur dan kelengkapan produk menjadi salah satu alasan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah atas memilih Puskesmas Lameuru

Perkembangan pemukiman dan kawasan industri yang masih terus berjalan di wilayah Puskesmas, masih menyimpan potensi besar bagi Puskesmas untuk meningkatkan pengembangan pasar.

3. *Product Development* (pengembangan produk)

Pengembangan produk pelayanan yang dilaksanakan oleh Puskesmas Puskesmas dengan memperhatikan kebutuhan konsumen melalui hasil identifikasi kebutuhan dan umpan balik masyarakat. Beberapa produk layanan yang menjadi unggulan antara lain:

- a. Layanan Baby Spa
- b. Layanan perawatan Estetika Gigi
- c. Layanan koperasi karyawan
- d. Layanan pojok konsultasi diet makanan sehat
- e. Layanan perawatan kebidanan keluarga
- f. Layanan imunisasi eksklusif
- g. Layanan klinik sanitasi

Selain mengembangkan produk khusus, Puskesmas juga mengembangkan *modelling* dan *special services* seperti : layanan pemeriksaan ibu hamil terpadu (ANC Terpadu), layanan pemeriksaan anak dengan pendekatan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit), Kelas ibu hamil, program pengelolaan penyakit kronis (prolanis).

4. *Vertical Integration* (integrasi vertikal)

Pengembangan pelayanan melalui strategi integrasi vertikal dilaksanakan dengan meningkatkan koordinasi

dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Konawe Selatan melalui koordinasi perencanaan anggaran, pembinaan dan pengawasan serta integrasi kegiatan yang menjadi prioritas di Kabupaten/Kota Konawe selatan

Laju pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan pemukiman apabila diikuti dengan perilaku pencarian pengobatan yang baik maka Puskesmas akan menjadi salah satu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Lokasi Puskesmas yang strategis merupakan kondisi yang menguntungkan untuk mengembangkan keanekaragaman pelayanan kesehatan karena memiliki pangsa pasar yang juga beraneka ragam.

Rencana pengembangan program pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Lameuru sampai dengan tahun 2026 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang kesehatan sehingga rencana pengembangan program pelayanan kesehatan.

5. Pengembangan Jenis Pelayanan

Peningkatan jumlah kunjungan rawat jalan Puskesmas Lameuru setiap tahun mengharuskan Puskesmas Lameuru untuk mencari inovasi agar lebih efisien dalam memberikan pelayanan pada pasien. Mengurangi waktu tunggu di unit pendaftaran maupun di poli merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pelayanan sehingga kepuasan pasien lebih meningkat. Oleh karena itu, Puskesmas Lameuru akan mengembangkan UGD 24 jam. Selain itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada pasien, Puskesmas Lameuru juga akan membuka layanan Pengembangan apotek 24 jam, dan pemeriksaan laboratorium lengkap.

Berdasarkan latar belakang di atas, jenis pelayanan yang akan dikembangkan di UPTD Puskesmas Lameuru yaitu:

- a. *E-medical record*
- b. UGD 24 Jam
- c. Apotek 24 jam
- d. Pemeriksaan IVA Test
- e. Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual

f. Pemeriksaan Laboratorium lengkap

6. Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan

Kebutuhan sarana dan prasarana di Puskesmas meningkat seiring dengan pemenuhan standar akreditasi Puskesmas dan peningkatan kunjungan Puskesmas.

Sistem antrian loket yang lebih mudah dan transparan akan dibutuhkan jika tingkat kunjungan makin meningkat.

Beberapa rencana terkait penambahan sarana maupun pengembangan sarana meliputi:

- a. UGD 24 jam
- b. Apotek umum 24 jam
- c. Rumah dinas dokter dan paramedic
- d. Pagar dan halaman parkir puskesmas

7. Peningkatan Mutu SDM Pelayanan

Seiring dengan meningkatnya kunjungan dan upaya antisipasi program *Universal Health Coverage* (UHC) yang akan meningkatkan jumlah peserta BPJS Kesehatan, maka Puskesmas Lameuru perlu melakukan rencana pengembangan SDM pelayanan meliputi Pelatihan tenaga dokter, perawat, bidan, gizi, sanitarian.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

A. VISI PUSKESMAS

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Visi Puskesmas disusun berdasarkan Visi Kabupaten Konawe Selatan pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021- 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan tahun 2021- 2026. Jika terjadi perubahan visi pemerintahan Kabupaten Konawe selatan yang dalam hal ini diterjemahkan oleh Puskesmas Lameuru, maka visi Puskesmas juga akan dilakukan revisi sesuai dengan perubahan tersebut.

Visi UPTD Puskesmas Lameuru tahun 2021- 2026 adalah :

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT MANDIRI MENUJU KECAMATAN
RANOMEETO BARAT SEHAT TAHUN 2026 "

Keterkaitan visi Puskesmas dengan Visi Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan yaitu: "Menuju Konawe Selatan yang sejahtera, unggul dan amanah berbasis perdesaan". Puskesmas Lameuru mendukung visi Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan menjadi lebih bermutu.

Visi UPTD Puskesmas Lameuru sejalan dengan cita-cita Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan mewujudkan kehidupan berkualitas melalui pemerataan layanan kesehatan. Selain melalui pemerataan, layanan kesehatan harus lebih bermutu sehingga masyarakat menerima pelayanan kesehatan yang berkualitas. kehidupan masyarakat lebih baik dan terdorong untuk berperan aktif dan mandiri untuk menjadi lebih sehat.

B. MISI, MOTTO DAN TATA NILAI PUSKESMAS

Berdasarkan Misi yang ada dalam RPJMD Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan. Misi yang terkait dengan program di UPTD Puskesmas Lameuru adalah sebagai berikut:

1. Membangkitkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat
2. Menjalin kemitraan lintas sektor Ranomeeto Barat
3. Menyelenggarakan layanan kesehatan yang bermutu, merata, terjangkau.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan mutu puskesmas

Untuk mewujudkan terciptanya pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau semua masyarakat, UPTD Puskesmas Lameuru berusaha meningkatkan pelayanan di Puskesmas Pembantu, adanya pelayanan Upaya kesehatan Masyarakat di Luar Gedung UPTD Puskesmas Lameuru.

Agar dapat mewujudkan Manajemen Layanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan maka, UPTD Puskesmas Lameuru membuat perencanaan peningkatan sarana prasarana dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perencanaan tingkat Puskesmas. Monitoring dan evaluasi kegiatan Puskesmas dilaksanakan melalui penilaian kinerja Puskesmas.

Menciptakan lingkungan sehat yang merupakan sumber kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat dapat dicapai dengan mengoptimalkan kegiatan promkes dan kesling serta meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor.

Untuk terciptanya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Unggul maka UPTD Puskesmas Lameuru membuat perencanaan pemenuhan kebutuhan dengan membuat Analisis Beban Kerja dan peningkatan kapasitas SDM melalui *In House training*, Workshop, pelatihan dan lain-lain.

Semua upaya untuk menjalankan misi mencapai visi Puskesmas tersebut perlu dilambangkan dalam suatu moto yang menjiwai seluruh personel dalam Organisasi Puskesmas. Moto atau juga semboyan adalah kalimat, frasa, atau kata sebagai semboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi, semangat, dan tujuan dari suatu organisasi. Berdasarkan Visi dan Misi UPTD Puskesmas Lameuru maka ditentukanlah Motto UPTD Puskesmas Lameuru sebagai berikut:

Motto :

MENDIDOHA (Mutu, Efektif, Nyaman, Doa, Inovatif, Dedikasi, Optimis, Harmonis, Aktif)

Tata Nilai UPTD Puskesmas Lameuru:

UPTD Puskesmas Lameuru memiliki Tata Nilai dan Budaya yang perlu diterapkan pada individu semua personel di Lingkungan UPTD Puskesmas Lameuru dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yaitu:

- Handal, dalam mengoptimalkan potensi SDM yang ada di kecamatan ranbar
- Amanah, dalam melaksanakan pelayanan memiliki integritas yang dapat dipercaya
- Tulus, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- Iklas dalam berkerja sama untuk mendapatkan hasil yang terbaik

C. TUJUAN PUSKESMAS

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna:

- Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra.
- Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi
- Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah saran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Berdasarkan hal tersebut maka tujuan UPTD Puskesmas Lameuru adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Masyarakat yang sehat Melalui Aksesibilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas”

D. SASARAN PUSKESMAS

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Sasaran dan

indikator sasaran UPTD Puskesmas Lameuru berdasarkan tujuan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan UPTD Puskesmas Lameuru Tahun 2021–2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	
Mewujudkan masyarakat yang sehat melalui aksesibilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		3	Pelayanan Kesehatan ibu dan Bayi Baru Lahir
		4	Pelayanan Kesehatan Balita dan anak pra sekolah
		5	Pelayanan kesehatan usia sekolah Dasar dan remaja
		6	Pelayanan kesehatan usia Reproduksi (15-59 tahun)
		7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut >60 tahun
		8	Pelayanan kesehatan usia sekolah Dasar
		9	Pelayanan kesehatan usia Reproduksi (15-59 tahun)
		10	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut >60 tahun
		11	Pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standar
		12	Pelayanan Kesehatan orang dengan TB
		13	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi sesuai standar
		14	Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular

		15	Pelayanan Gizi masyarakat
		16	Pelayanan Kesehatan Lingkungan
		17	Pelayanan Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
		18	Pelayanan Kesehatan kerja dan Olahraga
	Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan	1	Program indikator peningkatan mutu termasuk indikator mutu
		2	Manajemen Resiko
		3	Sasaran Keselamatan Pasien
		4	Insiden keselamatan pasien
		5	Pencegahan Penyakit Infeksi

E. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dibentuk untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dirumuskan dengan menentukan langkah pilihan yang tepat melalui analisis metode SWOT.

Adapun interaksi dan hasil interaksi dapat diikuti pada table berikut:

Analisis SWOT untuk tujuan Meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, status gizi dan pengendalian dengan pelayanan kesehatan bermutu

Faktor Internal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	1. Adanya Sistem manajemen yang berlaku (akreditasi FKTP) 2. Adanya Komitmen pimpinan 3. Adanya Alat Kesehatan yang mencukupi untuk beragam jenis layanan	1. Keterbatasan jumlah dan beberapa jenis tenaga penunjang, seperti perawat, bidan, Pranata Laboratorium, Pranata Komputer, Perekam medik, tenaga adminisitrasi umum

Faktor Internal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	<p>(alat pemeriksaan umum, pemeriksaan laboratorium)</p> <p>4. Adanya sarana yang memadai (gedung, kendaraan pusling, sarana IPAL)</p> <p>5. Adanya jenis ketenagaan yang mencukupi (dokter, apoteker, dokter gigi, perekam medis, bidan, ahli gizi, perawat gigi, sanitarian, analis medis, kesehatan masyarakat dan administrasi)</p> <p>6. Adanya akses yang mudah terjangkau masyarakat</p> <p>7. Adanya tarif pelayanan yang terjangkau</p> <p>8. Adanya layanan program yang mendukung promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif (pencegahan HIV dan IMS, kanker leher rahim, hepatitis, tuberkulosis, sadari dll)</p> <p>9. Adanya Dukungan lintas sektor</p>	<p>dan pelaksana program dibanding beban kerja pelayanan UKP dan program UKM</p> <p>2. Kurangnya jenis peningkatan kapasitas (pelatihan) petugas yang sudah terpenuhi</p> <p>3. Keterbatasan anggaran operasional (listrik, air, internet, kebersihan, dll)</p> <p>4. Keterbatasan tenaga perawat (D3, Ners)</p> <p>5. Keterbatasan anggaran pemeliharaan dan pengadaan sarana (gedung, alat kesehatan, kendaraan, IPAL, dll)</p> <p>6. Rendahnya honor pelayanan pegawai non PNS</p> <p>7. Rendahnya kemampuan Puskesmas menjangkau peserta JKN di luar wilayah Puskesmas</p> <p>8. Tingginya Ratio Rujukan Non spesialistik</p>

Faktor Eksternal - Peluang

Peluang (O)	SO	WO
1. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Mengoptimalkan mutu pelayanan melalui sistem manajemen mutu yang baik dan peningkatan strata akreditasi Puskesmas2. Mengoptimalkan ketersediaan alat kesehatan dan jenis layanan yang dapat dipenuhi3. kondisi sarana pelayanan melalui pemeliharaan dan perawatan yang baik4. Mengoptimalkan tenaga pelayanan dengan panduan SOP Pelayanan5. Mengoptimalkan informasi tarif pelayanan yang terjangkau kepada masyarakat luas	<ol style="list-style-type: none">1. Mengatasi keterbatasan jumlah tenaga kesehatan melalui peluang peningkatan pendapatan Puskesmas2. Mengatasi keterbatasan anggaran operasional melalui peluang peningkatan pendapatan Puskesmas Mengatasi keterbatasan anggaran pemeliharaan sarana melalui peluang peningkatan pendapatan Puskesmas3. rendahnya gaji/jasa pelayanan pegawai Non PNS melalui peluang peningkatan pendapatan Puskesmas

Peluang (O)	SO	WO
2. Adanya dukungan kebijakan daerah tentang pemenuhan sarana dan operasional Puskesmas	1. Mengoptimalkan adanya komitmen pimpinan dengan memanfaatkan adanya dukungan kebijakan daerah melalui perencanaan dan manajemen yang baik	1. Mengatasi keterbatasan anggaran operasional melalui perencanaan sesuai kebijakan daerah (mengatasi keterbatasan anggaran pemeliharaan sarana melalui perencanaan sesuai kebijakan daerah)
3. Adanya dukungan Kebijakan Pengadaan Formasi Pegawai dari Kementrian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan	1. Mengoptimalkan jenis dan jumlah tenaga yang ada di UPTD Puskesmas Lameuru melalui pembagian tugas tambahan kepada tenaga dengan memperhatikan kinerja dan kompetensi pegawai	1. Mengatasi Keterbatasan jumlah tenaga yang belum sesuai dengan standar
4. Adanya Kebijakan Universal Health Coverage (UHC) sistem Jaminan Kesehatan	1. Mengoptimalkan ketersediaan alat kesehatan dan jenis layanan yang dapat dipenuhi Mengoptimalkan kondisi sarana pelayanan melalui	1. Mengatasi keterbatasan jumlah tenaga melalui peluang peningkatan pendapatan kapitasi JKN 2. mengatasi keterbatasan

Peluang (O)	SO	WO
Nasional tahun 2020	<p>pemeliharaan dan perawatan yang baik</p> <p>2. Mengoptimalkan tenaga pelayanan dengan panduan SOP Pelayanan</p> <p>3. Mengoptimalkan informasi keberadaan, layanan JKN dan keunggulan Puskesmas melalui berbagai sarana informasi</p> <p>4. Mengoptimalkan informasi layanan program yang dapat diperoleh masyarakat di Puskesmas</p>	<p>kapasitas petugas kesehatan melalui peluang peningkatan pendapatan kapitasi JKN</p> <p>3. Mengatasi keterbatasan anggaran operasional melalui peluang peningkatan pendapatan kapitasi JKN</p> <p>4. keterbatasan anggaran pemeliharaan melalui peluang peningkatan pendapatan kapitasi JKN</p>

Faktor Eksternal - Ancaman

Ancaman(T)	ST	WT
1. Tingginya jumlah praktek mandiri tenaga kesehatan sebagai kompetitor dan jarak yang terlalu dekat antar FKTP	<p>1. Mengoptimalkan adanya sistem manajemen mutu akreditasi Puskesmas</p> <p>2. Mengoptimalkan jenis layanan dan keunggulan Puskesmas</p> <p>3. Mengoptimalkan layanan program dan kegiatan luar gedung sebagai differensiasi layanan Puskesmas</p>	<p>1. Mengatasi keterbatasan tenaga kesehatan untuk mengatasi Jarak Fasilitas Kesehatan Kompetitor yang terlalu dekat</p> <p>2. Mengatasi keterbatasan Puskesmas menjangkau peserta JKN di luar wilayah dengan teknologi komunikasi untuk mengatasi kompetitor FKTP</p>

Ancaman(T)	ST	WT
2. Kebijakan pelayanan JKN yang berubah-ubah	1. Mengoptimalkan mutu pelayanan melalui sistem manajemen mutu, panduan SOP pelayanan dan pelaksanaan akreditasi Puskesmas sebagai kebijakan pelayanan JKN di Puskesmas Mengoptimalkan komitmen pimpinan tentang kebijakan pelayanan JKN di Puskesmas	Mengatasi rendahnya gaji/ jasa pelayanan pegawai non PNS untuk mengatasi kebijakan pelayanan yang berubah-ubah dan tidak menguntungkan Mengatasi Tingginya Ratio Rujukan Non spesialisik dengan edukasi kepada masyarakat tentang 144 jenis penyakit yang dapat dilayani di FKTP secara tuntas

Berdasarkan perumusan strategi dengan menggunakan metode SWOT tersebut maka dapat disusun kerangka strategi UPTD Puskesmas Lameuru untuk mencapai sasaran dan tujuan sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Mewujudkan masyarakat yang sehat melalui aksesibilitas pelayanan kesehatan	1.Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan	1 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia	1 Menetapkan Layanan posyandu lansia dengan pemenuhan alkes dan Bahan Habis Pakai posyandu lansia

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
yang terjangkau dan berkualitas	kesehatan 2. meningkatnya mutu layanan kesehatan	2 Penanganan masalah gizi kurang, buruk dan Stunting pada bayi, balita, ibu hamil dan ibu menyusui	2 Menetapkan layanan untuk ibu dan anak seperti ANC terpadu, persalinan 24 jam, konseling laktasi, konseling gizi, pemeriksaan MTBS, KB pasca salin.
		3 Peningkatan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta pengaduan masyarakat tentang kesehatan	3 Meningkatkan Sosialisasi dan Menetapkan anggaran peningkatan kapasitas petugas dan kader setiap tahun dan meningkatkan promosi kesehatan melalui media sosial. Penyebaran informasi/kampanye.
		4 Peningkatan Pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan lingkungan	4 Menetapkan layanan pemeriksaan infeksi menular seksual dan HIV, layanan IVA, Posbindu
		5 Peningkatan pembinaan	5 Membentuk jejaring kerjasama

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		dan kerjasama jejaring dan jaringan Puskesmas	dengan RS melalui supervisi dan pembinaan
		6 Peningkatan mutu pelayanan, kecukupan dan kualitas SDM, sarana prasarana dan perbekalan kesehatan.	6 Menganggarkan pelatihan SDM kesehatan, mencukupi kebutuhan jenis SDM sesuai standar akreditasi Puskesmas dan pengadaan obat serta perbekalan kesehatan melalui kapitasi JKN
		7 Pengembang an layanan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebijakan bidang Kesehatan	7 Menetapkan UGD dan pelayanan PONED 24 jam. Serta Pelayanan vaksin covid-19

F. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN

Rencana Program

Dalam melakukan perencanaan pembangunan kesehatan tahun 2021-2026, arah kebijakan menjadi acuan penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan di UPTD Puskesmas Lameuru. Rencana strategis yang meliputi Rencana Pendapatan dan rencana belanja program, kegiatan, dan subkegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat dalam Lampiran.

Rencana pendapatan yang akan dicapai oleh UPTD Puskesmas Lameuru. pada tahun 2021 sampai dengan 2026 adalah sebagai berikut:

NO	JENIS PENDAPATAN	THN 2021	THN 2022	THN 2023	THN 2024	THN 2025	THN 2026
1	Pendapatan Layanan						
	- Jasa Pelayanan Medis	-	7.042.200	7.746.400	8.520.000	9.372.000	10.309.200
	- Kapitasi JKN	280.670.200	276.376.700	304.014.300	334.415.800	367.857.400	404.643.100
	- Non Kapitasi JKN	270.360.000	297.396.000	327.135.600	359.849.100	395.834.000	435.417.400
	- Layanan Kesehatan lain-lain	-	-	-	-	-	-
2	Pendapatan Hibah						
	- Terikat	-	-	-	-	-	-
	- Tidak Terikat	-	-	-	-	-	-
3	Hasil Kerjasama						
	- Kerjasama Operasional	-	-	-	100.000.000	110.000.000	121.000.000
	- Kerjasama Pemanfaatan Aset	-	-	-	10.000.000	11.000.000	12.100.000
4	APBD						
	- Belanja Operasional APBD	-	-	-	-	-	-
	- Bantuan Operasional	627.553.125	718.613.000	1.106.570.814	1.217.227.000	1.338.949.800	1.472.844.700

	kesehatan						
5	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	-	-	-	-	-	-
	- Pengem- bangan Usaha	-	-	-	25.000. 000	27.500. 000	30.350. 000
	JUMLAH						

Berdasarkan rencana pendapatan UPTD Puskesmas Lameuru dan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah disusun sebelumnya maka selanjutnya dapat disusun rencana program, kegiatan dan subkegiatan pada UPTD Puskesmas Lameuru selama 5 tahun kedepan sesuai periode kepemimpinan Bupati. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan meliputi berikut ini:

1. Program Penunjang Urusan UPTD Puskesmas Lameuru

- a. Kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Penyusunan dokumen perencanaan UPTD Puskesmas Lameuru;
 2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA ;
 3. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA;
 4. Koordinasi dan penyusunan DPA-;
 5. Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-; dan
 6. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja
- b. Kegiatan administrasi keuangan UPTD Puskesmas, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan;
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan;
 4. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi
 5. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;

6. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
 7. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran; dan
 8. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran.
- c. Kegiatan administrasi barang milik daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah;
 2. Pengamanan barang milik daerah;
 3. Koordinasi dan penilaian barang milik daerah;
 4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah;
 5. Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah;
 6. Penatausahaan barang milik daerah; dan
 7. Pemanfaatan barang milik daerah.
- d. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat UPTD Puskesmas, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
1. Peningkatan sarana prasarana disiplin aparatur;
 2. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
 3. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian;
 4. Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian;
 5. Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai;
 6. Pendidkan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi; dan
 7. Bimbingan teknis implementasi perundang undangan.
- e. Kegiatan administrasi umum perangkat UPTD Puskesmas, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 3. Penyediaan peralatan rumah tangga;
 4. Penyediaan bahan logistik kantor;

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 6. Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang undangan;
 7. Penyediaan bahan/material;
 8. Fasilitas kunjungan tamu;
 9. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi;
 10. Penatausahaan arsip dinamis; dan
 11. Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis Elektronik.
- f. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah UPTD Puskesmas, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
1. Pengadaan kendaraan perorangan dinas;
 2. Pengadaan kendaraan dinas operasional;
 3. Pengadaan mebel;
 4. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
 5. Pengadaan asset tetap lainnya;
 6. Pengadaan asset tak berwujud;
 7. Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya;
 8. Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya; dan
 9. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya.
- g. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan UPTD Puskesmas, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
1. Penyediaan jasa surat menyurat
 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; dan
 4. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- h. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan UPTD Puskesmas, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas;
 2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;

3. Pemeliharaan mebel;
 4. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
 5. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
 6. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
 7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan
 9. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya.
- i. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT.
- 2.1 Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP dengan sub kegiatan sebagai berikut :
1. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
 2. Pengembangan Puskesmas;
 3. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
 4. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas;
 5. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
 6. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan;
 7. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 8. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 9. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 10. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi;
 11. Pengadaan Obat, Vaksin;
 12. Pengadaan Bahan Habis Pakai;
 13. Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 14. Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan

15. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

2.2 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita;
5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis;
12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV;
13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB);
14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat;
15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga;
16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
17. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan;
18. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya;
19. Pengelolaan Surveilans Kesehatan;
20. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK);
21. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA;
22. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
23. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional;

24. Operasional Pelayanan Puskesmas;
 25. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal);
 26. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah;
 27. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
- 2.3 Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
1. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan;
 2. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan;
 3. Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet;
 4. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan; dan
 5. Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan.
3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
- a. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar; dan
 2. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia
 - b. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan , dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan;
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN.
- 4.1 Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - 4.2 Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat.
- 4.3 Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM), dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).

Program, kegiatan dan subkegiatan Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, secara rinci dapat dilihat dalam Lampiran dokumen Rencana Strategis BLUD UPTD Puskesmas Lameuru.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis pada UPTD Puskesmas Lameuru yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya kesehatan puskesmas dalam kurun waktu anggaran 2021 sampai dengan 2026 sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan rencana kerja tahunan berupa Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan/Plan of Action (RPK/POA) Puskesmas yang akan dituangkan dalam RBA belanja kegiatan serta laporan penilaian kinerja tahunan. Rencana Strategis juga digunakan sebagai acuan dalam melakukan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Penerapan BLUD pada Puskesmas diharapkan dapat meningkatkan kinerja layanan dengan didukung adanya fleksibilitas pengelolaan anggaran.

Semoga kedepannya, upaya yang dilakukan UPTD Puskesmas Lameuru sampai dengan tahun 2026 dapat lebih terarah dan terukur dan mendapat dukungan dan partisipasi pengelola Puskesmas serta perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah baik bersifat materiil, administratif maupun politis. Dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja dan sebagai masukan selanjutnya, Rencana Strategis akan dievaluasi pada pertengahan periode dan akhir periode sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan Rencana Strategis UPTD Puskesmas Lameuru melibatkan stakeholder terkait penyusunan kegiatan lintas program, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis ini. Tentunya seluruh tujuan dan sasaran yang direncanakan tidak akan berjalan maksimal tanpa bantuan kerjasama dan kerja keras dari segenap aparatur kesehatan di lingkungan UPTD Puskesmas Lameuru dan jaringannya. Rencana strategis selanjutnya akan diuraikan dalam dokumen Rencana Bisnis Anggaran BLUD dan digunakan oleh Puskesmas di dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sebagai upaya mencapai target kinerja pelayanan dan manajemen Puskesmas yang berkualitas.

Besar harapan untuk periode 5 tahun kedepan, seluruh jajaran tenaga kesehatan dapat melaksanakan komitmen yang telah disepakati bersama menuju terwujudnya Kabupaten Konawe Selatan yang mandiri dalam bidang kesehatan sesuai visi Kabupaten Konawe Selatan yaitu Kabupaten Konawe Selatan “Menuju Konawe Selatan yang Sejahtera, Unggul dan Amanah Berbasis Perdesaan”

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd

SURUNUDDIN DANGGA

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**


Dr. SUHARDIN.,SH.MH
Pembina Tk.I Gol.IV/b
NIP.19730819 200604 1 005



PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN (FORMULA)	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Pembentukan posyandu lansia di setiap desa	1. pembinaan kesehatan lanjut usia dilaksanakan secara terpadu dengan meningkatkan peran, koordinasi dan integrasi dengan lintas program dan lintas sektor.	Jumlah posyandu lansia/jumlah Desa di wilayah kecamatan x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Gizi	Persentase Ibu Hamil Anemia	Ibu hamil dengan kadar Hemoglobin (Hb) kurang dari 11,0 g/dl	Jumlah ibu hamil anemia / Jumlah ibu hamil yang diperiksa Hb X 100%	39%	39%	39%	35%	35%	35%
	Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	Ibu hamil dengan risiko Kurang Energi Kronik (KEK) yang ditandai dengan ukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) kurang dari 23,5 cm	Jumlah ibu hamil risiko KEK / Jumlah ibu hamil yang diukur LiLA X 100%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
	Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan	Ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) sekurangnya mengandung zat besi setara dengan 60 mg besi elemental dan 0,4 mg asam folat yang disediakan oleh pemerintah minimal 90 tablet selama masa kehamilan	Jumlah ibu hamil yang mendapat minimal 90 Tablet Tambah Darah / Jumlah ibu hamil yang ada X 100%	81%	82%	82%	82%	82%	82%
	Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan	Ibu hamil dengan risiko Kekurangan Energi Kronik (KEK) yang ditandai dengan ukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) kurang dari 23,5 cm yang mendapat makanan tambahan asupan zat gizi diluar makanan utama dalam bentuk makanan tambahan pabrikan	Jumlah ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan / Jumlah sasaran ibu hamil KEK yang ada X 100%	80%	80%	75%	75%	70%	70%

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN (FORMULA)	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Cakupan Balita yang di Timbang Berat Badannya (D/S)	Anak yang berusia 0 bulan sampai 59 bulan yang ditimbang berat badannya (D/S)	Jumlah balita ditimbang (D) / Jumlah Balita yang ada (S) X 100%	70%	70%	75%	75%	75%	75%
	Cakupan Balita memiliki Buku Kesehatan Ibu Anak (KIA)/ Kartu Menuju Sehat (KMS) (K/S)	Anak yang berusia 0 bulan sampai 59 bulan yang memiliki buku berisi catatan kesehatan ibu (hamil, bersalin dan nifas) dan anak (bayi baru lahir, bayi dan anak balita) serta berbagai informasi cara memelihara dan merawat kesehatan ibu serta grafik pertumbuhan anak yang dapat dipantau setiap bulan atau kartu yang memuat kurva pertumbuhan normal anak berdasarkan indeks antropometri berat badan menurut umur yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin.	Jumlah balita memiliki buku KIA/KMS (K) / Jumlah Balita yang ada (S) X 100%	70%	70%	70%	75%	75%	75%
	Cakupan Balita ditimbang yang Naik Berat Badannya (N/D)	Anak yang berusia 0 bulan sampai 59 bulan yang memiliki grafik berat badan mengikuti garis pertumbuhan atau kenaikan berat badan pada bulan ini dibandingkan bulan sebelumnya sesuai standar. Persentase balita ditimbang yang naik berat badannya adalah jumlah balita yang naik berat badannya terhadap jumlah balita yang ditimbang dikurangi balita tidak ditimbang bulan lalu dan balita baru dikali 100%.	Jumlah balita naik berat badannya (N) / Jumlah seluruh balita yang ditimbang (D) X 100%	82%	82%	82%	84%	84%	84%

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN (FORMULA)	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Prevalensi berat badan kurang (Berat badan kurang dan sangat kurang) pada balita	Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U) memiliki Z-score kurang dari - 2 SD	Jumlah balita berat badan kurang / Jumlah balita yang ditimbang berat badan X 100%	15%	15%	15%	14%	14%	14%
	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) memiliki Z-score kurang dari -2 SD	Jumlah balita pendek / Jumlah balita yang diukur panjang/tinggi badan X 100%	21.1%	21.1%	21.1%	18,4%	18,4%	18,4%
	Prevalensi <i>Wasting</i> (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan menurut Umur (BB/TB) memiliki Z-score kurang dari -2 SD	Jumlah Balita Gizi Kurang / Jumlah balita yang diukur berat badan dan panjang/tinggi badan X 100%	7.8%	7.8%	7.8%	7.5%	7.5%	7.5%
	Cakupan Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	Remaja perempuan berusia 12-18 tahun yang bersekolah di SMP/SMA atau sederajat mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) seminggu sekali yang sekurangnya mengandung zat besi setara dengan 60 mg besi elemental dan 0,4 mg asam folat	Jumlah remaja putri mendapat TTD / Jumlah seluruh remaja putri 12-18 tahun di sekolah X 100%	52%	52%	52%	54%	54%	54%
	Cakupan Rumah Tangga Mengonsumsi Garam Beriodium	Rumah tangga yang mengonsumsi garam dengan komponen utamanya Natrium Klorida (NaCl) dengan penambahan Kalium Iodat (KIO ₃) dan apabila diuji dengan	Jumlah rumah tangga yang mengonsumsi garam beriodium / Jumlah rumah tangga yang diperiksa X 100%	84%	84%	84%	86%	86%	86%

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN (FORMULA)	TARGET						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		larutan uji garam beriodium maka terjadi perubahan warna menjadi ungu.								
	Persentase Kabupaten/ Kota melaksanakan Surveilans Gizi	<p>Kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans gizi adalah kabupaten/kota yang minimal 70% dari jumlah puskesmas melakukan kegiatan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta diseminasi informasi</p> <p>1) Pengumpulan data adalah puskesmas di wilayah kerja kabupaten/kota melakukan entry data sasaran balita dan ibu hamil serta data pengukuran melalui Sistem Informasi Gizi Terpadu, rerata setiap bulan mencapai minimal 60% sasaran ibu hamil dan balita</p> <p>2) Pengolahan dan analisis data adalah puskesmas di wilayah kerja kabupaten/kota melakukan konfirmasi dan identifikasi penyebab masalah gizi pada seluruh balita gizi buruk</p> <p>3) Diseminasi informasi adalah puskesmas di wilayah kerja Kabupaten/Kota melakukan penyusunan rencana kegiatan berdasarkan hasil surveilans gizi dan di-upload kedalam system setiap triwulan</p>	Jumlah kabupaten kota melaksanakan surveilans gizi / Jumlah Kabupaten/Kota X 100	70%	70%	70%	80%	80%	80%	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN (FORMULA)	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Persentase Puskesmas mampu Tatalaksana Gizi Buruk pada Balita	Puskesmas mampu melakukan tatalaksana gizi buruk pada balita Balita Gizi buruk adalah balita usia 0-59 bulan dengan tanda klinis gizi buruk atau indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) dengan nilai Z-score kurang dari -3 SD atau Lingkar Lengan Atas <11,5cm bagi balita 6 – 59 bulan. Adalah puskesmas dengan kriteria: 1) Mempunyai Tim Asuhan Gizi terlatih, terdiri dari dokter, bidan/perawat, dan tenaga gizi 2) Memiliki Standar Prosedur Operasional tatalaksana gizi buruk pada balita	Jumlah Puskesmas mampu tatalaksana gizi buruk / Jumlah seluruh Puskesmas X 100	20%	20%	20%	30%	30%	30%
Promosi Kesehatan	Prosentase desa yang menerapkan kebijakan germas	Desa Yang melakukan kegiatan yang mengajak masyarakat untuk melakukan 5 (lima) Klaster Germas(Edukasi dan Prilaku Hidup Sehat, Aktifitas Fisik, Pangan Sehat dan Perbaikan Gizi, Deteksi Dini Penyakit, Kesehatan Lingkungan) dan melibatkan unsur lintas sektor (OPD), pendidikan (sekolah), UKBM (Posyandu, Posbindu PTM, Pos UKK, Pos Lansia, dll) dan atau mitra potensial (dunia usaha, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, dll)	Jumlah Desa yang menerapkan kebijakan Germas/ jumlah desa yang ada X 100%	40%	40%	45%	50%	55%	60%

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN (FORMULA)	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Prosentase desa yang melaksanakan pembinaan posyandu aktif	Desa Yang Melaksanakan pembinaan Posyandu Aktif dengan kriteria sebagai berikut 1. melakukan kegiatan rutin posyandu minimal 10 kali pertahun , 2. Memiliki Minimal 5 orang kader, yang disahkan dengan surat Keputusan kepala Desa 3. Cakupan Minimal 50 % ,Pelayanan Program KIA, Gizi, Imunisasi dan KB 4. Posyandu memiliki alat Pemantauan Pertumbuhan 5. Posyandu melakukan sekurang-kurangnya 1 kegiatan pengembangan	Jumlah Desa yang melaksanakan Pembinaan / jumlah desa yang ada x 100%	70%	70%	70%	80%	80%	80%
Kesehatan Lingkungan	Persentase Desa / Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Desa/kelurahan yang seluruh penduduknya tidak lagi melakukan praktek buang air besar sembarangan dibuktikan melalui proses verifikasi	Jumlah desa/kelurahan yang sudah terverifikasi SBS dibagi jumlah seluruh desa/kelurahan dikali 100%	50%	50%	55%	60%	65%	70%
	Persentase Sarana Air Minum Yang diawasi / diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	SAM yang dilakukan tinjauan dokumen RPAM (Rencana Pengamanan Air Minum), inspeksi kesehatan lingkungan dan diperiksa kualitas air minumnya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan KKP	Jumlah SAM yang dilakukan pengawasan eksternal oleh Dinas Kesehatan kab/kota dan KKP dalam satu tahun dibagi dengan jumlah SAM yang ada di kali 100%	70%	70%	70%	75%	75%	75%
	Persentase Tempat Pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi	TPP yang memenuhi syarat kesehatan adalah TPP yang dilaksanakan pengawasan melalui inspeksi Kesehatan Lingkungan	Jumlah TPP yang memenuhi syarat kesehatan berdasarkan hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan sesuai	50%	50%	55%	60%	65%	70%

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN (FORMULA)	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
HIV/Aids dan IMS	100% jumlah populasi beresiko di screaning hiv/aids &IMS	Setiap orang dengan resiko terinfeksi hiv mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi hiv yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun / jumlah orang dengan resiko terinfeksi hiv dalam kurun waktu 1 tahun x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	80% Ibu Hamil di screaning Shypilis			80%	80%	80%	80%	80%	80%
	100% ODHA baru mendapat terapi pencegahan TBC			40%	40%	40%	45%	45%	45%
	100% jumlah orang yang hiv (+) mendapat pengobatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%
	100% jumlah orang yang hiv (+) bertahan pengobatan arv seumur hidup			100%	100%	100%	100%	100%	100%
TB	Cakupan pengobatan Semua kasus TB yang di obati (treatment coverage/TC=CDR	Jumlah semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan di antara perkiraan jumlah semua kasus tuberkulosis (insiden)	Jumlah semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan/perkiraan jumlah semua kasus TB (insiden/target) x 100%	85%	85%	85%	90%	90%	90%
	Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus (Success Rate/SR)	Jumlah pasien tuberculosis semua kasus yang sembuh dan pengobatan lengkap diantara semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan	Jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap/Jumlah semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan x 100%	90%	90%	90%	90%	95%	100%

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN (FORMULA)	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	% kasus filariasis yang di tangani mencegah dan membatasi kecacatan melalui penatalaksanaan kasus klinis filariasis	Kasus filariasi yang ditangani :kasus filariasis yang di tangani untuk mencegah dan membatasi kecacatan melalui penatalaksanaan kasus klinis filariasis	Persentase kasus klinis yang di tangani per tahun =jumlah kasus klinis filariasis yang ditangani pada kasus tertentu / jumlah kasus klinis yang tercatat di tahun yg sama) x 100%	90%	90%	90%	95%	95%	100%
LB-1	Presentase pencatatan dan pelaporan LB1 Puskesmas	Pencatatan dan Pelaporan LB1 Puskesmas adalah Puskesmas yang melakukan pencatatan dan Pelaporan LB1 sesuai format yang berstandar program LB1	Jumlah puskesmas yang melaporkan sesuai format LB1 / Jumlah Puskesmas se Kab. KONSEL X 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Imunisasi	Imunisasi Dasar Lengkap	Kabupaten/Kota Yang Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap,: Bayi yang sudah mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap meliputi, imunisasi Hepatitis B 1 (satu) dosis, Imunisasi BCG 1 (satu) dosis, Imunisasi DPT HB Hib 3 (tiga) dosis, Imunisasi Polio 4 (empat) dosis, imunisasi Campat/MR 1 (satu) dosis	Jumlah bayi yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap di satu wilayah tertentu selama satu periode / Jumlah bayi yang ada di wilayah dan pada periode yang sama x 100%	90%	90%	94%	95%	96%	97%
	Cakupan Desa /kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Desa/kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlahbayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun	Jumlah desa/kelurahan UCI di satu wilayah pada kurun waktu tertentu / Jumlah desa/kelurahan di suatu wilayah kerja dan pada kurun waktu yang sama x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan Imunisasi HB0 <24 jam / 1-	Cakupan (Jumlah dan persentase) bayiusia HB0 <24 jam / 1-7 hari yang mendapatkan	Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi BCG pada	90%	90%	95%	95%	100%	100%

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN (FORMULA)	TARGET						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	7hari	imunisasi Hepatitis B	kurun waktu dan wilayah tertentu / Jumlah surviving infant pada wilayah dan periode yang sama x 100%							
	Cakupan Imunisasi BCG usia 0-11 bulan	Cakupan (Jumlah dan persentase) bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan 1 dosis imunisasi BCG	Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi BCG pada kurun waktu dan wilayah tertentu / Jumlah bayi lahir hidup pada kurun waktu dan wilayah yang sama x 100%	90%	90%	95%	95%	100%	100%	
	Cakupan imunisasi DPT-HB-Hib3/Polio4*/ = Campak/MR	Cakupan (Jumlah dan persentase) bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan 1 dosis imunisasi DPT-HB-Hib dosis ke 3, polio oral dosis ke 4* campak/MR 1 dosis imunisasi	Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi DPT-HB-HiB3/POLIO4*/Campak/ MR di satu wilayah tertentu selama satu periode / Jumlah surviving infant pada wilayah dan periode yang sama x 100%	90%	90%	95%	95%	100%	100%	
	Cakupan imunisasi DPT-HB-Hib4/= Campak/MR2	Cakupan (Jumlah dan persentase) Anak Usia 12-24 bulan yang mendapatkan 1 dosis imunisasi DPT-HB-Hib dosis ke 4, dan 1 dosis imunisasi campak/MR dosis ke 2	Jumlah anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi DPT-HB-HiB4/Campak/MR2 di satu wilayah tertentu selama satu periode / Jumlah anak usia 12-24 bulan lalu pada wilayah dan periode yang sama x 100%	90%	90%	95%	95%	100%	100%	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN (FORMULA)	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Cakupan BIAS	Bentuk operasional dari imunisasi lanjutan pada anak sekolah yang dilaksanakan pada bulan tertentu setiap tahunnya dengan sasaran semua anak kelas 1, 2 dan 5	Jumlah murid yang mendapat imunisasi MR, DT,Td, di sekolah Dasar/ sederajat bulan Oktober - Nopember pada bulan tertentu dan kurun waktu yang sama / Jumlah murid pada bulan Oktober - Nopember pada bulan tertentu dan kurun waktu yang sama X 100%	70%	70%	75%	75%	80%	80%
	Cakupan T2+	Imunisasi TT WUS = Pemberian imunisasi TT pada wanita usia subur (hamil dan tidak hamil usia 15-39 tahun) sebanyak 5 dosis dengan interval tertentu (yang dimulai saat dan atau sebelum kehamilan) yang berguna bagi kekebalan seumur hidup, Pemberian TT2 = interval minimal 4 minggu setelah TT1 dengan masa perlindungan 3 tahun, Pemberian TT3 = interval minimal 6 bulan setelah TT2 dengan masa perlindungan 5 tahun, Pemberian TT4 = interval minimal 1 tahun setelah TT3 dengan masa perlindungan 10 tahun, Pemberian TT5 = interval minimal 1 tahun setelah TT4 dengan masa perlindungan 25 tahun	Jumlah WUS mendapat imunisasi (TT1/TT2/TT3/TT4/TT5) pada wilayah dan kurun waktu tertentu / Jumlah WUS usia 15 - 39 tahun pada wilayah dan kurun waktu yang sama X 100%	60%	60%	65%	65%	70%	70%

2. Program : Pengelolaan BLUD Puskesmas Tahun 2021 - 2026

NO	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI	KONDISI AWAL 2021	TARGET PER TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Program indikator peningkatan mutu termasuk indikator mutu	Rata rata nilai IKM x 100 %	-	-	-	92%	92%	95%	95%
2	Manajemen Resiko	Adanya upaya pengendalian resiko dalam setiap kegiatan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi	-	-	-	92%	95%	95%	95%
3	Sasaran Keselamatan Pasien	Ketepatan identifikasi pasien, peningkatan komunikasi yang efektif, keamanan obat, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur dan tepat operasi	-	-	-	100%	100%	100%	100%
4	Insiden keselamatan pasien	Kejadian atau situasi yang dapat menyebabkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang seharusnya tidak terjadi	-	-	-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
5	Pencegahan Penyakit Infeksi	Adanya program pencegahan dan pengendalian infeksi di Puskesmas	-	-	-	100%	100%	100%	100%

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Pusat Kesehatan Masyarakat

UPTD Puskesmas Lameuru Tahun 2021 -2026

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022		Tahun										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra BLUD		Unit Kerja Penanggung jawab	Sumber Dana
						2022		2023		2024		2025		2026		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
Mewujudkan masyarakat yang sehat melalui aksesibilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan UPTD Puskesmas Kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja	Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat UPTD Puskesmas	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dok.	1.500.000	1 dok.	2.000.000	1 dok.	2.000.000	1 dok.	2.000.000	1 dok.	2.000.000	1 dok.	2.000.000	1 dok.	2.000.000	Pejabat pengelola keuangan	BLUD

		Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA	Jumlah Dokumen RKA	1 dok	500.000	1 dok	500.000	1 dok	1.000.000	1 dok	1.000.000	1 dok	1.000.000	1 dok	1.000.000	1 dok	1.000.000	Pejabat pengelola keuangan	BLUD
		Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 dok	500.000	1 dok	500.000	1 dok	1.000.000	1 dok	1.000.000	1 dok	1.000.000	1 dok	1.000.000	1 dok	1.000.000	Pejabat pengelola keuangan	BLUD
		Koordinasi dan penyusunan DPA	Jumlah Dokumen DPA	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		Pejabat pengelola keuangan	BLUD
		Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		Pejabat pengelola keuangan	BLUD
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja	Jumlah Dokumen Laporan capaian kinerja	1 dok	1.500.000	1 dok	2.000.000	1 dok	2.000.000	1 dok	2.000.000	1 dok	2.000.000	1 dok	2.000.000	1 dok	2.000.000	Pejabat pengelola keuangan	BLUD
		Kegiatan administrasi keuangan UPTD	Persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Pejabat pengelola keuangan	BLUD

		Puskesmas dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu																	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Frekwensi Pembayaran Gaji	14 bln		14 bln		14 bln		14 bln		14 bln		14 bln		14 bln		Tata Usaha	BLUD
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Frekwensi Pembayaran Honor ASN	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		Tata Usaha	BLUD
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah laporan Keuangan	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	Pejabat pengelola keuangan	BLUD
		Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi	1 laporan	500.000	1 laporan	500.000	1 laporan	500.000	1 laporan	500.000	1 laporan	500.000	1 laporan	500.000	1 laporan	500.000	Pejabat pengelola keuangan	BLUD
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	1.300.000	1 laporan	1.300.000	1 laporan	1.300.000	1 laporan	1.300.000	1 laporan	1.300.000	1 laporan	1.300.000	1 laporan	1.300.000	Pejabat pengelola keuangan	BLUD
		Pengelolaan dan penyiapan	Jumlah Dokumen	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	Pejabat pengelola	BLUD

		bahan tanggapan pemeriksaan	SPJ	ora n		ran		ran		n		ran		ran		ran		keuangan	
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	Jumlah Laporan keuangan Semester	1 lap ora n	1.000 .000	1 lapo ran	1.000 .000	1 lapo ran	1.000 .000	1 lapo ra n	1.000 .000	1 lapo ran	1.000 .000	1 lapo ran	1.000 .000	1 lapo ran	1.000 .000	Pejabat pengelola keuangan	BLUD
		Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Laporan Prognosis	1 lap ora n	500. 000	1 lapo ran	500. 000	1 lapo ran	500. 000	1 lapo ra n	500. 000	1 lapo ran	500. 000	1 lapo ran	500. 000	1 lapo ran	500. 000	Pejabat pengelola keuangan	BLUD
		Kegiatan administrasi barang milik daerah	Persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		Penyusunan perencanaan	Terlaksananya Kegiatan	1 keg		1 kegi		1 kegi		1 kegiat		1 kegi		1 kegi		1 kegi		Pengelola barang	BLUD

	kebutuhan barang milik daerah	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	iat an		atan		atan		an		atan		atan		atan			
	Pengamanan barang milik daerah	Honorarium Penjaga Malam	12 bulan	12.000.000	12 bulan	12.000.000	12 bulan	24.000.000	12 bulan	24.000.000	12 bulan	24.000.000	12 bulan	24.000.000	12 bulan	24.000.000	Pejabat Pengelola keuangan	JKN
	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah	Jumlah Koordinasi BMD	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		Pengelola barang	BLUD
	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah	Jumlah Dokumen Kartu Inventarisasi Barang (KIB)	1 dokumen	500.000	1 dokumen	500.000	1 dokumen	500.000	1 dokumen	600.000	1 dokumen	600.000	1 dokumen	600.000	1 dokumen	600.000	Pengelola barang	JKN
	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah	Persentase Teradministrasi Barang/ Asset Daerah	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Pengelola barang	BLUD
	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		Pengelola barang	BLUD
	Pemanfaatan barang milik	Persentase Barang	70%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Pengelola barang	BLUD

	daerah	Milik Daerah dimanfaatkan dalam kondisi baik																
	Kegiatan administrasi kepegawaian, perangkat UPTD Puskesmas	Persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%		100%		100%		100%		100%		100%					
	Peningkatan sarana prasarana disiplin aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket			Pengelola barang	BLUD	
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	-		-		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket			Tata usaha	BLUD	
	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian (DUK)	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			Tata usaha	BLUD	

		akuntabel & tepat waktu																
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	-	100%	1.622.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%		100%		Pengelola Barang	JKN/BLUD
		Penyediaan peralatan / bahan kegiatan kantor	100%	13.449.000	100%	23.449.031	100%	25.793.934	100%	28.373.328	100%	31.210.660	100%	34.331.726	100%		Pengelola Barang	JKN/BLUD
		Penyediaan peralatan rumah tangga	100%	-	100%	1.000.000	100%	5.000.000	100%	6.000.000	100%	7.000.000	100%	7.000.000	100%		Pengelola Barang	JKN/BLUD
		Penyediaan bahan logistik kantor	100%		100%		100%		100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%		Pengelola Barang	JKN/BLUD
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	20.803.000	100%	22.883.300	100%	25.171.630	100%	27.688.793	100%	30.457.672	100%		100%		Pengelola Barang	JKN/BLUD
		Fasilitas kunjungan	100%	-	100%	-	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%		Pengelola Barang	JKN/BLUD

	tamu	Kebutuhan Kunjungan																	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Frekwensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100%	66.438.000	100%	99.022.00	100%	103.973.100	100%	109.171.755	100%	114.630.343	100%	120.361.860	100%		Pengelola Barang	JKN/BLUD	
	Penatausahaan arsip dinamis	Frekuensi Penataan Arsip Dinamin	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Pengelola Barang	JKN/BLUD	
	Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis Elektronik	Frekwensi Pemeliharaan IT	100%		100%		100%	1.000.000	100%	1.100.000	100%	1.210.000	100%	1.331.000	100%		Pengelola Barang	JKN/BLUD	
	Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah UPTD Puskesmas	Persentase Peningkatan Aset Penunjang Perkantoran	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%				
	Pengadaan kendaraan perorangan	Jumlah Kendaraan Dinas	-		-		100%		100%		100%		100%		100%		Pengelola Barang	JKN/BLUD	

	dinas	Jabatan																
	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	-	-		100%		100%		100%		100%		100%			Pengelola Barang	JKN/BLUD
	Pengadaan mebel	Tersedianya Mebel Kantor	100%	2.300.000	100%	5.587.219	100%	6.145.941	100%	6.760.535	100%	7.436.588	100%	8.180.247	100%		Pengelola Barang	JKN/BLUD
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan Lainnya	100%	12.680.00	100%	30.030.608	100%	30.030.608	100%	30.030.608	100%	31.532.138	100%	31.532.138	100%	31.532.138	Pengelola Barang	JKN/BLUD
	Pengadaan asset tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap	100%	14.030.000	100%	30.030.608	100%	33.033.669	100%	36.337.036	100%	39.970.739	100%	43.967.813	100%		Pengelola Barang	JKN/BLUD
	Pengadaan asset tak berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Pengelola Barang	JKN/BLUD
	Pengadaan Gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah Gedung	100%	-	100%	-	100%	-	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%		Pengelola Barang	JKN/BLUD
	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor/Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Pengelola Barang	JKN/BLUD
	Pengadaan sarana dan	Jumlah Sarana &	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Pengelola Barang	JKN/BLUD

		prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Prasarana Pendukung Lainnya															
		Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan UPTD Puskesmas	Persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
		Penyediaan jasa surat menyurat	Frekwensi Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%		100%		100%		100%		100%		100%			Tata Usaha	BLUD
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Frekwensi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%		100%		100%		100%		100%		100%			Tata Usaha	BLUD
		Penyediaan jasa peralatan dan	Frekwensi Pembayaran Jasa	100%		100%		100%		100%		100%		100%			Tata Usaha	BLUD

		perlengkapan kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Frekwensi Pembayaran Jasa pelayanan Umum	100%		100%		100%		100%		100%		100%				Tata Usaha	BLUD
		Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan UPTD Puskesmas	Persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%		100%		100%		100%		100%		100%				Pengelola Barang	JKN/BLUD
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	Jumlah Pajak Kendaraan Operasional atau Lapangan yang dibayar	3 kendaraan		3 kendaraan		3 kendaraan		4 kendaraan		4 kendaraan		4 kendaraan				Pengelola Barang	JKN/BLUD

		kendaraan dinas operasional atau lapangan																
		Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebelair yang Terpelihara	100%	-	100%		100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000		Pengelola Barang	JKN/BLUD
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Terpelihara	100%	4.710.000	100%	6.832.000	100%	7.173.600	100%	7.532.280	100%	7.908.894	100%	8.304.339		Pengelola Barang	JKN/BLUD
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset tetap yang Terpelihara	100%	600.000	100%	2440.000	100%	3.247.640	100%	4.000.000	100%	4.000.000	100%	4.000.000		Pengelola Barang	JKN/BLUD
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset tak berwujud yang Terpelihara	100%		100%		100%		100%		100%		100%			Pengelola Barang	JKN/BLUD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	8.910.000	100%	9.310.000	100%	9.775.500	100%	10.264.275	100%	10.777.489	100%	11.316.363		Pengelola Barang	JKN/BLUD

	Lainnya	yang Terpelihara /terehabilit																	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana & prasarana gedung kantor/ bangunan yang Terpelihara /terehabilit asi	100%	600.000	100%	2440.000	100%	3.247.640	100%	4.000.000	100%	4.000.000	100%	4.000.000	100%		Pengelola Barang	JKN/BLUD	
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang Terpelihara /terehabilit Asi	100%	600.000	100%	2440.000	100%	3.247.640	100%	4.000.000	100%	4.000.000	100%	4.000.000	100%		Pengelola Barang	JKN/BLUD	
	Kegiatan Peningkatan	Persentase Peningkatan	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Pengelola Barang	JKN/BLUD	

	Pelayanan BLUD	Pelayanan BLUD																	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	-		-		100%	20.000.000	100%	21.000.000	100%	22.050.000	100%	23.152.500	100%	23.152.500	Pengelola Barang	JKN/BLUD	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																		
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%				
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan															Pengelola Barang	JKN/BLUD	

		Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED)																	
	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas Yang dikembangkan																Pengelola Barang	JKN/BLUD
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100%	-	100%	-	100%	-	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	100%	Pengelola Barang	JKN/BLUD	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas Yang direhabilitasi	100%	8.910.000	100%	9.310.000	100%	9.775.500	100%	10.264.275	100%	10.777.489	100%	11.316.363	100%	100%	Pengelola Barang	JKN/BLUD	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya															Pengelola Barang	JKN/BLUD	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas	Rehabilitasi & Pemeliharaan Rumah Dinas															Pengelola Barang	JKN/BLUD	

		Tenaga Kesehatan	Tenaga Kesehatan																
		Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		Pengelola Barang	JKN/BLUD
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		Pengelola Barang	JKN/BLUD
		Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Penyediaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100%	1.020.000	100%	9856389	100%	11.926.231	100%	13.118.854	100%	14.430.739	100%	15.000.000	100%		Pengelola Barang	JKN/BLUD
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Tersedianya Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Pengelola Barang	JKN/BLUD

		Pengadaan Obat, Vaksin	Terpenuhi ketersediaan obat dan Vaksin	100%	12.621.152	100%	47.337.555	100%	60.100.370	100%	60.100.370	100%	74.299.078	100%	94.675.110	100%		Pengelola Barang	JKN/BLUD
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Bahan Habis Pakai	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Pengelola Barang	JKN/BLUD
		Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Pengelola Barang	JKN/BLUD
		Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Pengelola Barang	JKN/BLUD
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas	Tersedianya Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Pengelola Barang	JKN/BLUD

	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan																
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;	Cakupan Ibu Hamil K4	58,4%		100%	300.000.000	10%	315.000.000	100%	330.750.000	100%	347.287.500	100%	364.651.875	100%		Program KIA	JKN/BOK
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi bidan (%)	100%		85%	350.000.000	90%	350.000.000	100%	367.500.000	100%	385.875.000	100%	405.168.750	100%		Program KIA	JKN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;	Cakupan kunjungan bayi	100%		95%	331.738.798	100%	348.324.900	100%	365.741.145	100%	384.028.202	100%	403.229.612	100%		Program KIA	JKN/BOK
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan Pelayanan Anak Balita	46,2%		90%	190.000.000	100%		100%		100%		100%		100%		Program Gizi	BOK

	Balita;																	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	93,1%		100%	175.598.612	100%		100%		100%		100%		100%		Program UKS	BOK
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	93,3		100%	130.792.300	100%		100%		100%		100%		100%		Program PTM	BOK
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;	Cakupan pelayanan kesehatan dasar terhadap lanjut usia	58,4%		100%	235.000.000	100%		100%		100%		100%		100%		Program Lansia	JKN/ BOK
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	52,7%		100%	205.000.000	100%		100%		100%		100%		100%		Program PTM	JKN/ BOK
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	85,8%		100%	201.000.000	100%		100%		100%		100%		100%		Program PTM	JKN/ BOK

		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	63,6%		100%	139.000.000	100%		100%		100%		100%		100%		Program Kesehatan Jiwa	BOK
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis;	Cakupan Penemuan Pasien Baru TBBTA Positif	77,4%		100%	234.000.000	100%		100%		100%		100%		100%		Program TB	BOK
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV;	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	85,4%		100%	150.000.000	100%		100%		100%		100%		100%		Program HIV/IMS	BOK
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian	Cakupan desa/Kelurahan mengalami KLB yg dilakukan penyelidikan			100%		100%		100%		100%		100%		100%		Program Surveilans	BOK

	Luar Biasa (KLB);																	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan			100%		100%		100%		100%		100%		100%		Program Gizi	BOK
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga;	Persentase desa yang mempunyai pos UKK			100%		100%		100%		100%		100%		100%		Program Kesehatan Kerja dan Olahraga	BOK
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan ;	Persentase Kelurahan /desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat			60%		70%		80%		90%		100%		100%		Program Kesehatan Lingkungan	BOK
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan;	Persentase Pelayanan Promosi Kesehatan			100%		100%		100%		100%		100%		100%		Program promosi Kesehatan	BOK
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,	Persentase Pelayanan Kesehatan Tradisional			100%		100%		100%		100%		100%		100%		Program Kesehatan tradisional	BOK

		Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya;	Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya yang dibina														1	
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan;	Cakupan Desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi <24jam			100%		100%		100%		100%		100%				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK);	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			100%		100%		100%		100%		100%			Program Kesehatan Jiwa	BOK
		Pengelolaan Pelayanan	Persentase Pelayanan			100%		100%		100%		100%		100%			Program Kesehatan	BOK

		Kesehatan Jiwa dan NAPZA;	Kesehatan Jiwa dan NAPZA														n Jiwa	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular;	Persentase Penyakit menular dan Tidak Menular yang ditangani			100%		100%		100%		100%		100%			Program Surveilans	BOK
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke LAB Rujukan/Nasional;	Persentase Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke LAB Rujukan/Nasional	100%		100%		100%		100%		100%		100%			Program Surveilans	BOK
		Operasional Pelayanan Puskesmas;	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	100%		100%		100%		100%		100%		100%			PJ UKP	JKN/BLUD
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan	Tersedianya Investigasi Awal Kejadian Tidak	100%		100%		100%		100%		100%		100%			Program imunisasi	BOK

		(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal);	Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)															
		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah; dan	Tersedianya Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	100%		100%		100%		100%		100%		100%			PJ Surveilans	BOK
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Tersedianya Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	100%		100%		100%		100%		100%		100%			PJ UKP	JKN/BLUD

		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah peserta masyarakat) mengikuti KIE keamanan pangan	orang													Program promosi Kesehatan	BOK
		Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif,	Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif	100%		100%		100%		100%		100%		100%			Program promosi Kesehatan	BOK
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Tersedianya Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100%		100%		100%		100%		100%		100%			Program promosi Kesehatan	BOK
		Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	100%		100%		100%		100%		100%		100%			Program promosi Kesehatan	BOK

		Daya Masyarakat (UKBM)	Daya Masyarakat (UKBM)																
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).	Tersedianya Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Program promosi Kesehatan	BOK

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd

SURUNUDDIN DANGGA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN


Dr. SUHARDIN., SH.MH
Pembina Tk.I Gol.IV/b
NIP.19730819 200604 1 005

